

PENGARUH *LEVERAGE*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
periode 2021 – 2024)



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma IV (Sarjana Terapan) Akuntansi Perpajakan pada Program Diploma IV
(Sarjana Terapan) Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

Airilia Astri Salsabila

NIM. 40011421650228

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV (SARJANA TERAPAN)
AKUNTANSI PERPAJAKAN
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Airilia Astri Salsabila
Nomor Induk Mahasiswa : 40011421650228
Fakultas : Sekolah Vokasi
Program Studi : D4 Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan *Capital intensity* Terhadap Penghindaran Pajak
(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024)

Semarang, 05 Juni 2025

Dosen Pembimbing



Herry Laksito S.E., Ak., M.Adv.Acc
NIP. 196905061999031002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Airilia Astri Salsabila
Nomor Induk Mahasiswa : 40011421650228
Fakultas : Sekolah Vokasi
Program Studi : D4 Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan *Capital intensity* Terhadap Penghindaran Pajak
(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024)

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 20 Juni 2025

Tim Penguji:

1. Herry Laksito S.E., Ak., M.Adv.Acc.

()

2. Lilik Rohmawati, S.E., M.Sc.

()

3. Hetika, S.Pd., M.Si.

()

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Airilia Astri Salsabila, menyatakan bahwa tugas akhir/skripsi dengan judul: “Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan *Capital intensity* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024)” yang disusun untuk melengkapi persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Diploma IV (S1 Terapan) Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro adalah hasil tulisan saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tugas akhir/skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik tugas akhir/skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 05 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Airilia Astri Salsabila

40011421650228

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *leverage*, kepemilikan institusional, dan *capital intensity* terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 - 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor keuangan dan kepemilikan yang memengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama periode penelitian. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode *purposive sampling* sebanyak 80 perusahaan, dan analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji hubungan antara variabel *leverage*, kepemilikan institusional, *capital intensity*, dan penghindaran pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional dan *capital intensity* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap praktik tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa struktur hutang perusahaan menjadi faktor utama yang memotivasi penghindaran pajak, sementara kepemilikan institusional dan intensitas modal kurang berperan dalam hal ini. Implikasi dari hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan *leverage* dalam perencanaan pajak perusahaan untuk mengurangi tingkat penghindaran pajak.

Kata Kunci: Penghindaran pajak, *leverage*, kepemilikan institusional, *capital intensity*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of leverage, institutional ownership, and capital intensity on tax avoidance practices among energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period of 2021 - 2024. The research is expected to provide a deeper understanding of the financial and ownership factors that influence corporate behavior in managing their tax obligations.

The data utilized in this study consist of secondary data obtained from the annual financial reports of energy sector companies listed on the IDX throughout the research period. A purposive sampling method was employed to select 80 companies as the research sample. Data analysis was conducted using multiple linear regression to examine the relationships between leverage, institutional ownership, capital intensity, and tax avoidance.

The results indicate that leverage has a significant effect on tax avoidance, whereas institutional ownership and capital intensity do not exhibit a significant impact on such practices. These findings suggest that the company's debt structure is a primary factor motivating tax avoidance, while institutional ownership and capital intensity play a less substantial role. The implications of this study emphasize the importance of stringent monitoring of leverage utilization in corporate tax planning to effectively reduce the level of tax avoidance.

Keywords: Tax avoidance, leverage, institutional ownership, capital intensity

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan *Capital intensity* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2024)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro,
2. Prof. Dr. Ir. Budiyono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro,
3. Apip S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Universitas Diponegoro.
4. Herry Laksito S.E., Ak., M.Adv.Acc selaku Dosen Pembimbing,
5. Dosen Wali serta seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Perpajakan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama proses kuliah dan penyusunan skripsi ini,

6. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Eko Asri Yuniarto yang tak pernah lelah mengajarkan arti tanggung jawab dan keteguhan hati. Meski tak selalu banyak berkata-kata, kehadiran Ayah selalu menjadi sumber kekuatan dan semangat yang tak ternilai. Setiap peluh dan usaha yang Ayah curahkan demi keberlangsungan pendidikan penulis, akan selalu penulis kenang sebagai bentuk cinta paling tulus. Doa dan restu Ayah adalah bekal penting yang membuat penulis mampu menyelesaikan perjalanan ini.
7. Pintu surgaku, Ibunda Sunarsih yang doanya tidak selalu terdengar tapi sampai. Terimakasih sudah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis dengan penuh kasih, sayang, serta cinta hingga penulis dapat tumbuh dewasa dan berada diposisi saat ini. Terimakasih untuk semua do'a yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia untuk bunda dan ayah karena telah menjadi figur orangtua yang tak tergantikan bagi penulis,
8. Anellia Albira Yuniart, adik penulis yang tak jarang menjadi penyemangat di tengah kepenatan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi adik yang membawa keceriaan bagi penulis.
9. Teman-teman seperjuangan tercinta, Heni Aprilia Christianingrum, Rahmawati Hidayatul Musthofa dan Eka Laily Nurul Hasanah, yang sejak awal perkuliahan selalu ada, menemani setiap langkah dengan ketulusan dan semangat yang tak pernah padam.
10. Maulida, Pradipta, Abhisena, Albara, Abidzar, Razidan, Joseph, yang kehadirannya mungkin tak selalu terlihat, tapi selalu terasa. Terima kasih atas waktu, telinga yang mendengarkan keluh kesah, serta kehangatan yang

sederhana namun berarti. Terimakasih telah menjadi setengah bagian dari perjalanan hidup penulis hingga titik ini,

11. Teman-teman Program Sarjana Terapan Sekolah Vokasi Akuntansi Perpajakan, Universitas Diponegoro Semarang, yang selalu memberikan semangat, dan dorongan moril sehingga penulis mampu menyelesaikan proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik,
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu menyumbangkan tenaga dan pemikirannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berkat dukungan yang diberikan oleh semua pihak. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 05 Juni 2025

Penulis,



Airilia Astri Salsabila

NIM. 40011421650228

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Teori Keagenan	15
2.1.2 Penghindaran Pajak.....	16
2.1.3 <i>Leverage</i>	17

2.1.4 Kepemilikan Institusional	19
2.1.5 <i>Capital intensity</i>	20
2.2 Peneliti Terdahulu.....	21
2.3 Kerangka Berpikir	28
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	28
2.4.1 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak.....	28
2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak	30
2.4.3 Pengaruh <i>Capital intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Definisi Operasional Variabel	34
3.1.1 Variabel Bebas (X).....	34
3.1.1.1 <i>Leverage</i> (X1).....	35
3.1.1.2 Kepemilikan Institusional (X2)	36
3.1.1.3 <i>Capital intensity</i> (X3)	36
3.1.2 Variabel Terikat (Y).....	37
3.2 Populasi dan Sampel.....	38
3.2.1 Populasi.....	38
3.2.2 Sampel.....	39
3.3 Jenis dan Sumber Data	40
3.4 Metode Pengumpulan Data	41
3.5 Metode Analisis Data	42
3.5.1 Statistik Deskriptif	42

3.5.2 Regresi Linear Berganda.....	43
3.5.3 Uji Asumsi Klasik	44
3.5.3.1 Uji Normalitas	45
3.5.3.2 Uji Multikolinearitas.....	45
3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas	47
3.5.3.4 Uji Autokorelasi	48
3.5.4 Uji Hipotesis	49
3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	49
3.5.4.2 Uji Signifikasi Simultan (<i>F-test</i>).....	50
3.5.4.3 Uji Parsial (<i>T-Test</i>)	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	53
4.2 Analisis Data	54
4.2.1 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif.....	54
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	55
4.2.2.1 Hasil Uji Normalitas	55
4.2.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas	58
4.2.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	59
4.2.2.1 Hasil Uji Autokorelasi	60
4.2.3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	61
4.2.4 Hasil Uji Hipotesis	63

4.2.2.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	63
4.2.2.1 Hasil Uji Simultan (F - <i>Test</i>)	64
4.2.2.1 Hasil Uji Parsial (T - <i>Test</i>).....	65
4.3 Interpretasi Hasil	67
4.3.1 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak.....	67
4.3.2 Pengaruh Kepemilikan Instiusional Terhadap Penghindaran Pajak	68
4.3.2 Pengaruh <i>Capital intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak	70
BAB V PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Keterbatasan Penelitian	74
5.3 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

1.1	Rasio Pajak Perusahaan Sektor Energi	4
2.1	Penelitian Terdahulu	22
4.1	Kriteria Sampel	53
4.2	Hasil Uji Statistik Deskriptif	54
4.3	Hasil Uji Normalitas	56
4.4	Hasil Uji Multikolonieritas	58
4.5	Hasil Uji Autokorelasi	61
4.6	Hasil Uji Regresi Linear Beganda	62
4.7	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	63
4.8	Hasil Uji Simultan (F - Test).....	65
4.9	Hasil Uji Parsial (T – Test)	66

DAFTAR GAMBAR

2.1	Kerangka Berpikir	28
4.1	Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram	57
4.2	Hasil Uji Normalitas Probability Plot P-Plot	58
4.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perusahaan yang memenuhi kriteria	81
Lampiran 2 Perhitungan <i>Leverage</i> (X1)	83
Lampiran 3 Perhitungan Kepemilikan Institusional (X2)	86
Lampiran 4 Perhitungan <i>Capital intensity</i> (X3)	89
Lampiran 5 Perhitungan Penghindaran Pajak (Y)	92
Lampiran 6 Tabulasi Keseluruhan	95
Lampiran 7 Output SPSS	98
• Uji Statistik Deskriptif	98
• Uji Normalitas	98
• Uji Multikolinearitas	99
• Uji Autokorelasi	99
• Uji Regresi Linear Beganda	99
• Uji Koefisien Determinasi (R^2)	100
• Uji Simultan (F-Test)	100
• Uji Parsial (T-Test)	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ialah satu dari sumber penghasilan utama bagi negara yang mempunyai potensi besar dalam mendanai beragam kebutuhan pembangunan nasional, yang tercermin dari besarnya kontribusi penerimaan perpajakan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga dalam praktik pelaksanaan sistem perpajakan seringkali terdapatnya perbedaan tujuan antara pemerintah selaku pihak yang berwenang memungut pajak dan pihak wajib pajak sebagai pembayar pajak, khususnya perusahaan. Pemerintah tentu menginginkan penerimaan pajak yang optimal guna mendukung penyelenggaraan negara, sementara perusahaan sebagai pihak yang dikenai kewajiban pajak kebanyakan berusaha mengurangi beban pajaknya supaya tetap efisien secara finansial dan menjaga keberlangsungan usaha. Upaya mengurangi kewajiban pajak bisa dilaksanakan dengan beragam cara, baik yang tetap berdasarkan peraturan pajak (*lawful*) maupun yang melanggar aturan pajak (*unlawful*).

Menurut Putri dan Damayanti (2021) penghindaran pajak ialah upaya yang dilaksanakan oleh pihak wajib pajak guna memberikan pengurangan kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan celah dan ketidaksempurnaan dalam peraturan perpajakan secara legal, sementara penggelapan pajak ialah tindakan wajib pajak guna menghindari kewajiban pajak secara tidak sah melalui menyembunyikan kondisi yang sebenarnya, baik secara sengaja maupun akibat kelalaian (Pangemanan & Watulingas, 2021). Kedua praktik tersebut mempunyai tujuan yang serupa, yaitu guna menurunkan besarnya pajak yang harus dilunasi wajib pajak. Tetapi, perbedaan terletak pada metode atau cara yang dipakai dalam pelaksanaannya. Baik penghindaran pajak maupun penggelapan pajak ialah isu yang kompleks dan menjadi tantangan tersendiri dalam sistem perpajakan. Di satu sisi, perusahaan berusaha mencari celah supaya bisa membayar pajak dalam jumlah yang lebih kecil guna menekan beban finansial. Tetapi di sisi lain, baik tindakan penghindaran yang mempunyai sifat legal maupun penggelapan yang melanggar hukum sama-sama berdampak negatif sebab mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Penghindaran pajak menjadi topik penelitian yang menarik sebab kompleksitas dan dampaknya signifikan baik bagi perusahaan maupun negara. Penelitian mengenai penghindaran pajak terus berkembang sebab adanya kebutuhan guna mendalami berbagai faktor yang memberikan pengaruhnya serta konsekuensi yang ditimbulkannya, hal ini didukung oleh Tanamal dan Nariman (2021) yang memaparkan salah satu daya tarik utama penghindaran pajak yakni

bagaimana praktik ini memberikan pengaruh penerimaan negara, yang ialah sumber pendanaan vital guna pembangunan. Berdasarkan data dari *Tax Justice Network* tahun 2020, Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar akibat praktik penghindaran pajak, yakni sebesar Rp69,2 triliun yang berasal dari korporasi serta Rp1,1 triliun dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Angka ini menempatkan Indonesia pada posisi keempat di kawasan Asia dalam hal kasus penghindaran pajak, menunjukkan bahwa persoalan ini masih menjadi tantangan serius.

Selain itu, menurut laporan dari *Asian Development Bank* (ADB), rasio perpajakan nasional Indonesia atau yang dikenal dengan istilah *tax effort* pada tahun 2022 berada di angka 0,60. Angka tersebut menandakan jika pemerintah baru mampu mengumpulkan sekitar 60% dari total potensi penerimaan pajak yang seharusnya bisa didapatkan. Sehingga masih ada sekitar 40% potensi penerimaan pajak yang belum berhasil dimaksimalkan, yang mencerminkan perlunya upaya lebih lanjut dalam memberikan peningkatan kepatuhan dan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia. Kondisi ini terjadi sebab ada sejumlah sektor ekonomi yang masih belum optimal dalam pemajakan, yang ditandai dengan kontribusi terhadap PDB yang melebihi dibandingkan kontribusinya terhadap penerimaan pajak.

Berbagai perusahaan di sektor energi menjadi fokus utama dalam kajian penelitian ini. Perusahaan pada sektor energi ialah kontributor signifikan terhadap penerimaan negara melalui pajak dan royalti. Sehingga praktik penghindaran pajak yang dilaksanakan perusahaan dalam sektor ini akan

berdampak besar terhadap keuangan negara. Menurut data Kementerian Keuangan pada tahun 2022, sumber daya mineral serta sektor energi menyumbang sekitar 21% dari total penerimaan pajak negara.

Tabel 1.1 Rasio Pajak Perusahaan Sektor Energi

Tax Ratio	2019	2020	2021	2022
Nasional	9,80%	8,30%	9,10%	10,40%
Energi	1,70%	1,22%	5,10%	8,30%

Sumber: Kementerian Keuangan

Data di atas memperlihatkan bahwa kontribusi rasio pajak dari sektor energi masih jauh lebih rendah daripada rasio pajak nasional. Nilai rasio pajak mengalami fluktuasi yang cukup signifikan antara rasio pajak nasional dan rasio sektor energi selama periode 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019, rasio pajak nasional tercatat sebesar 9,80%, sementara sektor energi hanya mencapai 1,70%, menandakan rendahnya kontribusi pajak dari sektor energi. Pada tahun 2020, kedua nilai tersebut mengalami penurunan menjadi 8,30% untuk nasional dan 1,22% untuk sektor energi, yang disebabkan oleh dampak pandemik (Hasyim *et al.*, 2022). Pada tahun 2021, rasio pajak nasional meningkat sedikit menjadi 9,10% seiring dengan pemulihan ekonomi, sementara sektor energi mengalami kenaikan signifikan menjadi 5,10% sebab kenaikan harga energi dan upaya pemerintah dalam memberikan peningkatan kepatuhan pajak (Dhini, 2022). Pada tahun 2022, rasio pajak nasional kembali naik ke angka 10,40%, dan sektor energi meningkat menjadi 8,30%, tetapi meskipun ada kenaikan, rasio sektor energi masih tetap lebih rendah daripada nasional. Kegagalan dalam mencapai

target rasio pajak mencerminkan masih terdapatnya praktik penghindaran pajak. Rendahnya kontribusi penerimaan pajak dari sektor energi disebabkan oleh tingginya intensitas penghindaran pajak, ditambah dengan keberadaan aktivitas pertambangan ilegal yang tersebar luas dan beroperasi dalam sektor ekonomi informal ataupun ekonomi bayangan (Wildan, 2023).

Satu dari fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yakni kasus praktik penghindaran pajak yang dilaksanakan PT Adaro Energy Tbk., salah satu dari perusahaan tambang batu bara paling besar yang ada di Indonesia, menjadi sorotan beberapa tahun terakhir. Dalam laporan yang dirilis oleh lembaga internasional *Global Witness*, Adaro diduga melaksanakan praktik *transfer pricing* melalui penjualan batubara ke anak perusahaannya, *Coaltrade Services International*, yang berlokasi di Singapura. Transaksi tersebut dilakukan dengan menetapkan harga jual yang dibawah harga pasar, sehingga keuntungan yang seharusnya dikenakan pajak di Indonesia dialihkan ke Singapura, negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Praktik ini mengakibatkan potensi kerugian penerimaan pajak Indonesia yang diperkirakan mencapai sekitar US\$125 juta atau sekitar Rp1,75 triliun. Kasus ini memberikan gambaran tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memberikan pengawasan perpajakan di sektor energi, khususnya terhadap perusahaan multinasional yang memakai struktur transaksi lintas negara guna memberikan pengurangan beban pajak di dalam negeri.

Penelitian terdahulu mengenai penghindaran pajak juga seringkali memfokuskan pada pengaruh kepemilikan institusional serta *leverage* secara

terpisah atas penghindaran pajak. Layaknya contoh penelitian menurut Rahmawati *et al.*, (2023) yang hanya fokus pada pengaruh *leverage* dan profitabilitas atas penghindaran pajak tanpa mempertimbangkan variabel *capital intensity* dan kepemilikan institusional. Penelitian tersebut memakai sampel perusahaan manufaktur di subsektor minuman serta makana di BEI pada periode 2019-2021, sehingga cakupan variabel dan sektor relatif terbatas. Selain itu, studi oleh A. Y. Sari *et al.*, (2021) lebih fokus pada pengaruh kepemilikan institusional serta *leverage* atas penghindaran pajak tanpa mempertimbangkan intensitas modal (*capital intensity*) sebagai variabel yang berdampak pada keputusan penghindaran pajak. Dengan memasukkan variabel *capital intensity*, penelitian ini mencoba memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana struktur aset perusahaan bisa memberikan pengaruh perilaku penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengisi celah tersebut melalui analisis bagaimana *leverage*, kepemilikan institusional, dan *capital intensity* berkontribusi atas penghindaran pajak secara bersamaan.

Pada penelitian ini, *leverage* menjadi satu dari variabel bebas sebab diyakini mempunyai hubungan signifikan atas praktik penghindaran pajak pada perusahaan. *Leverage* yakni rasio yang memberikan gambaran proporsi penggunaan dana asing ataupun hutang dalam struktur modal perusahaan daripada dana sendiri ataupun ekuitas. Dengan kata lain, *leverage* memperlihatkan besarnya perusahaan memakai pinjaman guna mendanai aset dan operasionalnya. Tingkat *leverage* yang tinggi menandakan perusahaan lebih

banyak memakai hutang dibandingkan modal sendiri, yang bisa memberikan pengaruh risiko dan return perusahaan secara signifikan (D. Sari *et al.*, 2021). Berikut studi yang menemukan jika *leverage* mempunyai pengaruh positif atas penghindaran pajak. Misalnya, penelitian oleh Septiana dan Zulkifli (2024) memperlihatkan jika *leverage* secara signifikan memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Tetapi, tidak semua studi menemukan hubungan positif antara *leverage* dan penghindaran pajak. Penelitian oleh Indarto *et al.* (2024) pada perusahaan konstruksi di Indonesia menemukan jika *leverage* mempunyai pengaruh negatif atas penghindaran pajak. Hal ini memperlihatkan jika hubungan antara *leverage* serta penghindaran pajak dapat bervariasi tergantung pada sektor industri dan karakteristik perusahaan.

Selain itu kepemilikan institusional juga menjadi faktor yang sesuai pada penelitian ini. Sudjinan *et al.* (2024) memaparkan jika kepemilikan institusional yakni proporsi saham yang dimiliki oleh institusi keuangan, layaknya bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, serta manajer aset. Kepemilikan institusional dipilih pada penelitian ini sebab institusi sebagai pemegang saham kebanyakan mempunyai pengetahuan dan akses yang melebihi atas strategi manajerial, termasuk perencanaan pajak yang agresif. Institusi sering kali berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan dalam jangka pendek dan efisiensi kinerja, sehingga mereka bisa memberikan dorongan manajemen guna memanfaatkan celah-celah dalam regulasi pajak demi mengurangi beban pajak perusahaan. Hal ini diperkuat oleh temuan Aditya dan Achmad (2021) menemukan jika

kepemilikan institusional mempunyai pengaruh positif atas penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilaksanakan oleh Martalena *et al.*, (2023) menandakan jika kepemilikan institusional mempunyai pengaruh negatif atas penghindaran pajak, investor institusional tertentu terutama yang mempunyai horison investasi jangka panjang dan lebih peduli terhadap reputasi serta keberlanjutan perusahaan, kebanyakan kurang mendukung praktik penghindaran pajak yang agresif. Mereka mungkin melihat penghindaran pajak yang berlebihan sebagai sumber risiko yang bisa merusak nilai perusahaan dalam jangka panjang, termasuk risiko litigasi, denda, dan kerusakan reputasi.

Capital intensity ataupun intensitas modal, merujuk pada seberapa jauh perusahaan menginvestasikan asetnya pada wujud aset tetap layaknya peralatan, properti, serta pabrik. Menurut Irmawati dan Abidin (2025) *capital intensity* dimaknai sebagai besarnya investasi perusahaan pada aset tetap, yang bisa dimanfaatkan guna memberikan pengurangan beban pajak melalui penyusutan, sehingga menurunkan laba kena pajak. *Capital intensity* dipilih sebab mencerminkan proporsi investasi perusahaan pada aset tetap layaknya peralatan, properti, serta pabrik. Aset tetap ini umumnya mengalami penyusutan yang bisa dikurangkan dari laba kena pajak, sehingga perusahaan dengan *capital intensity* tinggi mempunyai peluang melebihi guna memberikan pengurangan beban pajaknya secara legal (Anggraini *et al.*, 2020).

Beberapa studi dalam lima tahun terakhir memperlihatkan hubungan antara penghindaran pajak serta *capital intensity*. Misalnya, penelitian oleh Ernawati dan Indriyanto (2024) menemukan bahwa *capital intensity* mempunyai pengaruh

secara positif atas praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdata di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016 hingga 2020. Dengan kata lain, peningkatan intensitas modal perusahaan kebanyakan diikuti oleh meningkatnya peluang perusahaan tersebut guna melaksanakan penghindaran pajak. Tetapi, hasil yang tidak sama ditemukan dalam studi oleh Nirwasita *et al.*, (2024) yang meneliti perusahaan sektor energi di BEI tahun 2020–2023. Penelitian ini memperlihatkan jika *capital intensity* mempunyai pengaruh negatif signifikan atas penghindaran pajak, yang artinya perusahaan dengan intensitas modal tinggi kebanyakan melaksanakan penghindaran pajak yang lebih rendah.

Dengan terdapatnya perbedaan temuan ini, penelitian lebih lanjut dibutuhkan guna medalami bagaimana *leverage*, kepemilikan institusional, dan *capital intensity* memberikan pengaruh penghindaran pajak di beragam jenis perusahaan dan konteks industri yang berbeda. Mengingat peran penting perusahaan sektor energi dalam sektor perekonomian dan potensi dampak praktik penghindaran pajak terhadap penerimaan negara. Penelitian ini mengkaji dampak *leverage*, kepemilikan institusional dan *capital intensity* atas penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdata di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang waktu 2021 sampai 2024. Hasil penelitian ini diinginkan bisa dijadikan masukan bagi otoritas pajak dalam memberikan peningkatan pengawasan atas sektor energi. Dengan mendalami bagaimana beragam jenis kepemilikan memberikan pengaruh penghindaran pajak, otoritas

pajak dapat memperluas kebijakan dan sistem pengawasan yang lebih baik guna mengurangi penghindaran pajak tanpa menghambat pertumbuhan sektor energi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang sudah dipaparkan dalam latar belakang, maka didapat rumusan masalah yakni:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui pertimbangan latar belakang, rumusan masalah serta temuan yang berbeda dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan guna:

1. Mengetahui apakah kepemilikan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024.

2. Mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024.
3. Mengetahui apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai manfaat tersendiri, baik guna diri peneliti sendiri maupun pihak-pihak yang berhubungan. Adapun manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini yakni:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diinginkan bisa memberikan tambahan wawasan, memperluas ilmu ekonomi khususnya pada bidang akuntansi dan perpajakan dengan memberikan gambaran mengenai berbagai faktor yang bisa memberikan pengaruh ataupun tidak memberikan pengaruh perusahaan saat pengambilan keputusan guna melaksanakan penghindaran pajak, khususnya perusahaan sektor energi yang terdata di Bursa Efek Indonesia, serta guna memberikan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya di masa mendatang.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini memiliki manfaat yang ingin dicapai yakni:

1. Bagi perusahaan

Memberikan kontribusi pemikiran yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perpajakan perusahaan, sehingga bisa memberikan bantuan dalam pengembangan strategi perpajakan yang lebih efektif dan optimal.

2. Bagi Penulis

Guna memperluas wawasan dan pemahaman tentang penghindaran pajak serta berbagai faktor yang memberikan pengaruhnya, khususnya pada perusahaan di sektor energi. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi menjadi media guna menerapkan ilmu yang didapatkan penulis selama perkuliahan sekaligus memperkaya pengalaman praktis dalam melaksanakan penelitian.

3. Lembaga Pendidikan

Penelitian ini akan memperkaya referensi di perpustakaan Universitas Diponegoro, sehingga mahasiswa dapat memanfaatkannya sebagai sumber informasi dan data guna kegiatan akademik mereka. Selain itu, sebagai sebuah karya ilmiah, penelitian ini juga turut merepresentasikan keberhasilan lembaga pendidikan dalam membimbing serta memperluas kemampuan mahasiswa.

1.5 Sistematika Penelitian

Guna mendapatkan pemahaman yang lebih terstruktur serta jelas serta mempermudah dalam membahas permasalahan dan isi penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi penjelasan mengenai latar belakang meningkatnya praktik penghindaran pajak di Indonesia beserta berbagai faktor yang memberikan pengaruhnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, kemudian dirumuskan permasalahan, tujuan, dan manfaat penelitian, serta disusun sistematika penulisan sebagai panduan dalam penyajian karya tulis ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Berisikan landasan teori yang membahas konsep-konsep layaknya teori agensi, penghindaran pajak, *leverage*, kepemilikan institusional, serta *capital intensity*. Selain itu, bab ini juga mencakup tinjauan terhadap berbagai penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis penelitian, serta penyusunan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menguraikan berbagai variabel yang dijadikan fokus pengujian, di mana penyusunan data serta penentuan sampel melibatkan sejumlah kriteria tertentu guna menetapkan jenis serta asal-usul data yang dipakai turut dipaparkan, disertai dengan penjabaran mengenai teknik pengumpulan data serta pendekatan analisis yang diterapkan dalam proses penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penjabaran terhadap objek yang diteliti beserta hasil pengolahan datanya menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Selain itu,

dilaksanakan pula pengujian hipotesis yang mendalam, dilanjutkan dengan pemaknaan terhadap hasil yang didapatkan. Proses analisis data dilengkapi dengan penjelasan yang mempunyai sifat argumentatif sebagai dasar dalam merekomendasikan pengambilan keputusan. Seluruh rangkaian ini bertujuan guna memberikan interpretasi yang komprehensif terhadap temuan yang telah didapatkan.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan atas hasil penelitian ini, keterbatasan-keterbatasan, serta saran yang dapat dipergunakan guna penelitian kemudian hari.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan ialah kesepakatan antara satu ataupun berbagai manajemen serta pemegang saham guna melaksanakan beragam tugas atas nama para pemegang saham, dengan memberikan kewenangan pengambilan keputusan kepada manajemen. Dalam hal ini, manajemen sebagai pihak yang mengelola perusahaan mempunyai pemahaman yang lebih mendalam mengenai kelangsungan bisnis serta informasi internal perusahaan daripada pemilik ataupun pihak pemangku kepentingan yang lain.

Teori agensi menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) akibat perbedaan tujuan dan asimetri informasi. Dalam konteks penghindaran pajak, manajer sebagai pihak yang mengelola operasional perusahaan memiliki insentif untuk melakukan penghindaran pajak guna meningkatkan laba bersih perusahaan. Namun, tindakan tersebut tidak selalu sejalan dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham, karena dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi. Oleh karena itu, penghindaran pajak dalam perspektif teori agensi mencerminkan upaya agen dalam mengelola beban pajak perusahaan, yang dapat menguntungkan atau

merugikan prinsipal tergantung pada efektivitas dan transparansi pengelolaannya.

Teori keagenan menjadi landasan penting pada penelitian tata kelola perusahaan, khususnya dalam mendalami bagaimana *leverage*, kepemilikan institusional dan *capital intensity* dalam hal penghindaran pajak. Dengan mendalami prinsip-prinsip teori keagenan, regulator, pemegang saham, serta pemangku kepentingan yang lain dapat merancang kebijakan yang lebih efektif guna memitigasi konflik keagenan dan memberikan peningkatan efisiensi perusahaan secara keseluruhan.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak yakni usaha yang dilaksanakan wajib pajak guna memberikan pengurangan besaran pajak yang wajib dibayarkan dengan memakai metode-metode yang tetap berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi kerap kali yang ada pada wilayah abu-abu antara legal dan etis. Menurut Saraswati dan Utami (2023) Penghindaran pajak ialah tindakan yang dilaksanakan entitas ataupun individu guna menurunkan jumlah pajak yang wajib dilunasi dengan cara memanfaatkan kekurangan ataupun celah dalam regulasi perpajakan yang ada. Dengan demikian, wajib pajak memakai celah hukum yang sah dalam sistem perpajakan guna memberikan pengurangan kewajiban pajaknya tanpa melanggar aturan secara langsung.

Dari perspektif teori agensi, manajer sebagai agen mungkin termotivasi guna melaksanakan penghindaran pajak dengan beragam alasan. Di satu sisi, pengurangan jumlah pajak yang wajib dilunasi bisa memberikan peningkatan laba bersih sesudah pajak, yang pada gilirannya berpotensi menaikkan nilai perusahaan serta memberikan keuntungan bagi para pemegang saham (Desai & Dharmapala, 2006). Tetapi, di sisi lain, praktik penghindaran pajak yang agresif bisa menimbulkan risiko reputasi, risiko litigasi, ataupun pengawasan yang lebih ketat dari otoritas pajak, yang pada akhirnya dapat merugikan perusahaan. Manajer mungkin juga melaksanakan penghindaran pajak guna kepentingan pribadinya, misalnya guna mencapai target laba tertentu supaya mendapatkan bonus yang melebihi.

Pada penelitian, penghindaran pajak umumnya dinilai dengan memakai indikator proksi layaknya Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate/ETR*), *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, ataupun perbedaan antara laporan keuangan dan laporan pajak (*Book-Tax Differences/BTD*) (Hanlon & Heitzman, 2010).

2.1.3 Leverage

Leverage yakni rasio yang memperlihatkan seberapa jauh perusahaan memakai dana yang berasal dari utang guna mendanai aktivitas operasionalnya. Secara umum, *leverage* dapat dinilai dengan rasio utang atas total aset ataupun utang terhadap ekuitas. Dengan rasio ini, bisa terlihat besarnya eksposur perusahaan atas risiko keuangan,

khususnya yang berkaitan dengan kapasitasnya dalam melunasi kewajiban jangka panjang (Brigham & Houston, 2019). Semakin tinggi rasio *leverage*, semakin besar juga ketergantungan perusahaan terhadap pembiayaan eksternal berupa utang. Pada konteks keuangan perusahaan, *leverage* menjadi indikator penting dalam menilai struktur modal dan strategi pembiayaan. Perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi kebanyakan memanfaatkan pinjaman guna memberikan peningkatan laba dengan modal sendiri yang seminimal mungkin.

Dari sudut pandang teori agensi, penggunaan utang dapat berfungsi sebagai mekanisme disiplin bagi manajer (Jensen & Meckling, 1976). Kewajiban guna melunasi bunga serta pokok pinjaman dengan periodik dapat membatasi diskresi manajer dalam memakai arus kas bebas (*free cash flow*) perusahaan guna investasi yang tidak memberikan keuntungan ataupun pengeluaran yang tidak perlu. Sehingga utang bisa memberikan bantuan menyamakan kepentingan manajer serta pemegang saham dengan memberikan pengurangan potensi masalah agensi mengenai penggunaan arus kas bebas.

Pada konteks perusahaan energi yang terdata di Bursa Efek Indonesia (BEI), *leverage* menjadi semakin penting mengingat sektor ini sering kali membutuhkan modal besar guna mendukung operasional dan ekspansi. Tingginya kebutuhan dana menjadikan perusahaan energi sangat mungkin memakai pembiayaan utang, sehingga relevansi *leverage* atas strategi penghindaran pajak dalam industri ini patut untuk dikaji lebih

lanjut. Selain itu, *leverage* dalam perusahaan publik juga sering kali menjadi perhatian investor dan analis pasar sebab berkaitan erat dengan kinerja keuangan dan risiko investasi.

2.1.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham perusahaan yang dipunyai lembaga keuangan besar, layaknya bank, reksa dana, dana pensiun, perusahaan asuransi serta beragam lembaga investasi yang lain (Shleifer & Vishny, 1997). Investor institusional umumnya dianggap mempunyai sumber daya, keahlian, dan insentif yang melebihi guna memberikan pemantauan aktivitas manajemen perusahaan dibandingkan investor individu yang tersebar. Kehadiran mereka dalam struktur kepemilikan perusahaan bisa memberikan pengaruh kebijakan dan kinerja perusahaan.

Dalam perspektif teori keagenan, kepemilikan institusional dianggap menjadi satu dari mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif dalam mengatasi dan memberikan pengurangan konflik kepentingan antara pihak-pihak mengenai (Pound, 1988). Investor institusional mempunyai kemampuan dan motivasi guna melaksanakan monitoring secara aktif terhadap keputusan-keputusan manajerial. Mereka dapat memakai hak suara mereka, melaksanakan dialog dengan manajemen, ataupun bahkan mengancam guna menjual saham mereka (exit) jika kinerja manajemen tidak memuaskan. Sehingga keyang adaan

investor institusional diinginkan bisa memberikan dorongan manajer guna berupaya demi kepentingan pemegang saham.

Tetapi, peran investor institusional tidak selalu seragam. Berbagai penelitian memperlihatkan jika tidak semua tipe investor institusional mempunyai efek monitoring yang sama; misalnya, investor institusional yang berorientasi jangka panjang kebanyakan lebih efektif dalam memonitor dibandingkan investor institusional yang berorientasi jangka pendek ataupun mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan (Chen *et al.*, 2007). Meskipun demikian, secara umum, konsentrasi kepemilikan di tangan investor institusional yang aktif dianggap bisa memberikan peningkatan kualitas pengawasan dan mengurangi keseimbangan informasi antara manajemen dan pemegang saham.

2.1.5 *Capital intensity*

Capital intensity ataupun intensitas modal memperlihatkan tingkat ketergantungan perusahaan pada aset tetap, layaknya peralatan, properti, serta pabrik, dalam proses penciptaan penghasilan (Scott, 2015). Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi yakni perusahaan yang mempunyai proporsi aset tetap yang besar atas total asetnya. Rasio yang umum dipakai guna menilai intensitas modal yakni rasio aset tetap atas total aset.

Perusahaan yang mempunyai tingkat intensitas modal tinggi umumnya menanggung biaya penyusutan yang cukup besar. Biaya penyusutan tersebut berperan menjadi pengurang penghasilan kena

pajak, sehingga bisa berupaya menjadi pelindung pajak alami bagi perusahaan (Gupta & Newberry, 1997). Sehingga perusahaan yang mempunyai intensitas modal tinggi mungkin mempunyai lebih banyak peluang guna perencanaan pajak mengenai aset tetap, layaknya pemilihan metode penyusutan yang dipercepat ataupun pemanfaatan insentif pajak mengenai investasi pada aset tetap. Hal ini berpotensi memberikan pengaruh seberapa jauh perusahaan melaksanakan penghindaran pajak.

Dari perspektif teori agensi, keputusan investasi pada aset tetap dalam jumlah besar yang mencerminkan intensitas modal tinggi bisa dijadikan subjek masalah agensi. Manajer mungkin mempunyai kecenderungan guna melaksanakan investasi berlebihan pada aset tetap guna membangun "kerajaan" (*empire building*) ataupun sebab optimisme berlebihan, meskipun investasi tersebut tidak selalu memberikan peningkatan nilai pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Pengawasan yang efektif, termasuk dari investor institusional, menjadi penting guna memberikan kepastian jika investasi pada aset tetap dilaksanakan secara efisien dan berkontribusi positif terhadap nilai perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penghindaran pajak sudah banyak yang dilaksanakan berbagai penelitian sebelumnya. Di bawah ini ialah tabel yang

memperlihatkan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai penghindaran pajak serta beragam faktor yang memberikan pengaruhnya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Alfionita Br Kaban, Shabrina Tri Asti Nasution, Thezar Fiqih Hidayat Hasibuan (2024)	Pengaruh <i>capital intensity</i> dan profitabilitas terhadap <i>Tax avoidance</i> pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2022	<i>Capital intensity</i> berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan sektor pertambangan, profitabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan sektor pertambangan
2	Ernawati, Indriyanto (2024)	<i>Tax avoidance</i> : Faktor profitabilitas, leverage dan <i>Capital intensity</i>	Profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>capital intensity</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
3	Della Selviana, Fidiana (2023)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan	<i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , profitabilitas tidak

		Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax avoidance</i>	berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
4	Sylvania Salsabilla, Fajar Nurdin (2023)	Pengaruh Transfer Pricing, ROA, <i>Leverage</i> , dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak di BEI Tahun 2017-2021	Transfer pricing berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5	Ayu Mirah Amelia Amyrta, Fidiana (2022)	Pengaruh Good Corporate Governance dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax avoidance</i>	Kepemilikan institusional terdapat pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , Koneksi Politik

			berhubungan positif dan tidak signifikan
6	Alifatul Akmal Al Hasyim, Nur Isna Inayati, Ani Kusbandiyah, Tiara Pnadansari (2022)	Pengaruh Transer Pricing, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak	Transfer pricing memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak, kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak dan intensitas modal memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak.
7	Achmad Tarmizi, Didin Hikmah Perkasa (2021)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga, dan <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
	Chitra Ayu Whardhany, Adhitya Putri	Pengaruh Harga Transfer, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan	Harga Transfer tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, <i>Leverage</i> berpengaruh

	Pratiwi, Bima C Pratama (2021)	Terhadap Penghindaran Pajak	positif terhadap penghindaran pajak, dan Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
8	Jose Juventius Tanamal, Augustpaosa Nariman (2021)	Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>tax avoidance</i> perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	Profitability (ROA) memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki arah yang negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>Leverage</i> memiliki pengaruh positif dan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , Firm size memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , Sales growth memiliki pengaruh negatif dan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
9	Rohmah Ahdian Sari, Susi Dwi Mulyani (2020)	Pengaruh Resiko Perusahaan dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax avoidance</i> dengan Corporate Social	Resiko perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Tax avoidance</i> , Kepemilikan Institusional berpengaruh positif

		Responsibility sebagai Variabel Moderasi	terhadap <i>Tax avoidance</i> , Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap <i>Tax avoidance</i> , Corporate Social Responsibility tidak mampu memoderasi pengaruh resiko perusahaan terhadap <i>Tax avoidance</i> , Corporate Social Responsibility tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap <i>Tax avoidance</i>
10	Widawati, Wahidahwati (2019)	Pengaruh Struktur Kepemilikan, Kebijakan Perusahaan, dan Risiko Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak	Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , keputusan pendanaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> ,

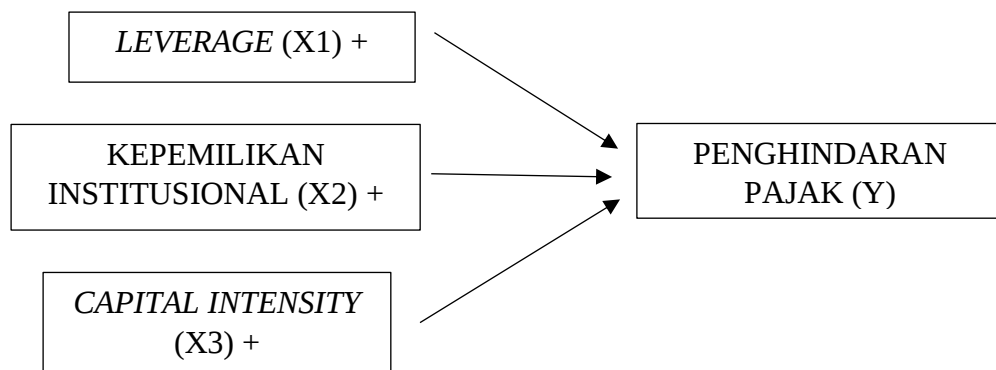
			keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , keputusan operasional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , risiko bisnis berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>
--	--	--	---

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, ditemukan bahwa *leverage*, kepemilikan institusional, dan *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. *Leverage* yang tinggi memberikan beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga mendorong perusahaan untuk memaksimalkan strategi penghindaran pajak. Kepemilikan institusional yang besar cenderung memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk strategi penghematan pajak untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Sementara itu, *capital intensity* yang tinggi, ditandai dengan besarnya aset tetap, memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan depresiasi sebagai sarana pengurang beban pajak. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut berkontribusi dalam mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara legal melalui optimalisasi celah-celah dalam peraturan perpajakan.

2.3 Kerangka Berpikir

Dari kajian literatur serta hasil penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan, kerangka pemikiran pada penelitian ini bisa diilustrasikan pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Leverage yakni rasio keuangan yang memberikan gambaran seberapa jauh perusahaan memakai dana yang berasal dari utang dalam struktur permodalannya. Rasio ini mencerminkan tingkat risiko keuangan yang ditanggung perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Menurut Brigham dan Houston (2019), *leverage* memperlihatkan proporsi dana yang didapatkan dari kreditur daripada dana dari pemilik, dan dipakai guna memberikan peningkatan potensi keuntungan, tetapi juga memberikan peningkatan risiko kebangkrutan jika tidak dikelola dengan hati-hati. Hal ini disebabkan oleh tekanan dari

pemberi pinjaman yang menginginkan perusahaan menjaga kepatuhan hukum dan stabilitas finansial.

Hubungan antara teori agensi dan *leverage* sudah menjadi fokus beragam penelitian dalam lima tahun terakhir. Teori agensi memaparkan konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (*principal*) serta manajer (*agent*), di mana *leverage* ataupun penggunaan utang dapat berperan dalam mengelola konflik tersebut. Menurut Suparyadi & Rahardjo (2024) teori agensi mendukung pengaruh *leverage* karena perusahaan dapat memanfaatkan aset yang dimilikinya dan sumber pendanaan yang memiliki biaya tetap, seperti pinjaman, untuk meninggikan laba bagi penanam modal (*principal*). *Leverage* yang tinggi memungkinkan perusahaan memperoleh manfaat dari pengurang pajak atas beban bunga, sekaligus mendorong manajer untuk mencari cara menekan beban pajak secara keseluruhan.

Menurut Erlisa *et al.*, (2024) semakin tinggi *leverage*, maka semakin rendah nilai *CETR*. Nilai *CETR* yang rendah mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi *leverage*, maka semakin tinggi juga tingkat penghindaran pajak. Hal ini diperkuat pada studi Selviana dan Fidiana (2023) memaparkan jika semakin tinggi tingkat *leverage* pada perusahaan, semakin besar pula peluang terjadinya peningkatan praktik penghindaran pajak, karena perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi akan mendapatkan insentif pajak yang bisa dimanfaatkan untuk memperkecil beban pajak.

hal ini diperkuat oleh temuan Salsabilla dan Nurdin (2023) menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H₁: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional merujuk pada persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh beragam lembaga keuangan, seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, bank, serta reksa dana. Investor institusional ini umumnya dianggap sebagai investor yang lebih canggih dan memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan analisis mendalam serta pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan. Keberadaan mereka dalam struktur kepemilikan diharapkan bisa dijadikan satu dari mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif, sebab mereka mempunyai kepentingan finansial signifikan dan kemampuan guna memberikan pengaruh kebijakan perusahaan demi melindungi investasi mereka.

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan kepemilikan institusional dipandang sebagai satu dari mekanisme monitoring eksternal yang efektif guna memberikan pengurangan konflik keagenan antara pemegang saham (prinsipal) serta manajer (agen). Teori agensi memaparkan jika manajer mungkin berupaya guna kepentingan pribadi yang tidak selalu sesuai tujuan pemegang saham guna memaksimalkan kekayaan. Investor institusional, dengan porsi kepemilikan yang besar,

berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan perusahaan, terutama dalam hal perencanaan pajak.

Zakaria & Muid (2024) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat diartikan juga semakin tinggi penghindaran pajak, semakin rendah *CETR* karena pemilik institusional menginginkan perusahaan yang mereka tanami modal memperoleh keuntungan maksimal. Untuk mencapai hal tersebut, mereka mendorong perusahaan mengurangi beban biaya. Pernyataan tersebut sejalan dengan temuan oleh Achmad Tarmizi dan Didin Hikmah Perkasa (2022) dan Widawati dan Wahidahwati (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4.3 Pengaruh *Capital intensity* Terhadap Penghindaran Pajak

Capital intensity mengacu pada proporsi aset tetap ataupun investasi modal dalam total aset perusahaan. Variabel ini memberikan gambaran seberapa jauh perusahaan memakai modal fisik (seperti mesin, peralatan, dan bangunan) daripada aset lancar ataupun tenaga kerja dalam proses produksi (Qin *et al.*, 2022). *Capital intensity* tinggi artinya perusahaan lebih banyak memakai aset tetap dalam

operasionalnya, yang umumnya memerlukan investasi besar dan sifatnya jangka panjang.

Menurut teori agensi Jensen dan Meckling (1976), konflik antara manajer (*agent*) serta pemilik (*principal*) bisa memberikan pengaruh perilaku penghindaran pajak. Manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan ke dalam bentuk aset tetap, dengan tujuan memanfaatkan biaya depresiasinya sebagai pengurang beban pajak. Kurniawati dan Mukti (2023) menyatakan semakin besar *capital intensity* yang dimiliki perusahaan maka semakin besar juga perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat berarti semakin tinggi penghindaran pajak, semakin rendah *CETR* karena perusahaan yang memiliki aset tetap tinggi akan terdapat beban penyusutan yang dapat menjadi pengurang laba sebelum pajak.

Beberapa penelitian memperlihatkan hasil yang sejalan dengan teori tersebut. Misalnya, Ernawati dan Indriyanto (2024) menemukan jika semakin tinggi tingkat intensitas modal (*Capital intensity*), semakin besar pula peluang perusahaan melaksanakan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh ketentuan pada keputusan Dirjen Pajak No KEP-220/PJ./2002 yang mengatur pemberlakuan biaya penyusutan pada aset tetap, yang bisa memberikan pengaruh perhitungan pajak yang wajib dilunasi oleh perusahaan. Selain itu, penelitian oleh (Hasyim *et al.*, 2022) juga melaporkan hubungan positif antara *capital intensity* serta penghindaran pajak. Studi lain oleh (Anggraini *et al.*, 2020) memperkuat

temuan ini dengan memperlihatkan jika *capital intensity* ialah satu dari faktor signifikan saat memaparkan variasi tarif pajak efektif, di mana intensitas modal yang lebih tinggi diasosiasikan dengan tarif pajak efektif yang lebih rendah, menandakan terdapatnya penghindaran pajak.

H₃: *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yakni penjabaran konsep ataupun istilah yang dipakai pada penelitian menjadi indikator yang bisa dinilai ataupun diamati secara empirik. Menurut Sugiyono (2020) definisi operasional variabel yakni pendeskripsian variabel penelitian supaya dapat dinilai dan dimengerti oleh semua pihak yang terlibat pada penelitian. Definisi ini penting guna memaparkan bagaimana variabel diterapkan secara spesifik dalam penelitian. Definisi operasional variabel berfungsi guna menjembatani konsep yang mempunyai sifat abstrak dengan pengukuran yang nyata. Variabel pada penelitian ini dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu variabel bebas yang berperan memberikan pengaruh variabel lain, serta variabel terikat yang dijadikan variabel yang dipengaruhi. Pada penelitian ini, ada tiga variabel bebas (X) serta satu variabel terikat (Y). Berikut yakni definisi operasional dari berbagai variabel yang dipakai pada penelitian ini:

3.1.1 Variabel Bebas (X)

Variabel bebas yakni variabel yang memberikan pengaruh ataupun menjadi penyebab perubahan dalam variabel lain, yaitu variabel terikat. Variabel ini mempunyai sifat bebas dalam arti tidak terpengaruh variabel lain di pada penelitian. Menurut Sugiyono (2020), variabel bebas yakni variabel yang dijadikan faktor utama dalam menetapkan hubungan kausal pada penelitian. Variabel bebas

umumnya dirancang, dimanipulasi, ataupun dinilai oleh peneliti guna melihat pengaruhnya atas variabel terikat. Berikut variabel bebas pada penelitian ini:

3.1.1.1 *Leverage (X1)*

Leverage adalah pengukur besarnya perbandingan keuangan perusahaan memakai hutang untuk pembiayaan perusahaan yang digambarkan dengan modal (A. Y. Sari et al., 2021). *Leverage* memperlihatkan seberapa besar ketergantungan perusahaan pada dana pinjaman. Semakin tinggi *leverage*, maka semakin besar pula risiko keuangan yang ditanggung perusahaan karena kewajiban membayar bunga dan pokok utang. Namun di sisi lain, bunga utang dapat diakui sebagai biaya sehingga mengurangi laba kena pajak. Hal ini membuat perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung memiliki insentif untuk melakukan penghindaran pajak secara legal melalui pemanfaatan beban bunga sebagai pengurang pajak.

Pada penelitian ini, *leverage* diukur dari rasio yang mengukur kemampuan utang, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek yang digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan (Erlisa et al., 2024). Rasio *leverage* yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3.1.1.2 Kepemilikan Institusional (X2)

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, bank dan kepemilikan institusi lain (Widawati & Wahidahwati, 2019). Lembaga-lembaga ini bisa mendorong atau mengawasi praktik penghindaran pajak, tergantung pada tujuan investasinya. Jika ingin laba tinggi, mereka bisa mendukung penghindaran pajak yang legal, namun juga bisa membatasi jika dianggap berisiko.

Kepemilikan institusional dihitung jumlah saham institusi dibanding dengan jumlah keseluruhan saham (Zakaria & Muid, 2024). Berikut rasio yang digunakan dalam penelitian ini:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Saham Beredar}} \times 100\%$$

3.1.1.3 *Capital intensity* (X3)

Capital intensity atau intensitas modal menunjukkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan laba, dimana sumber dana dapat diperoleh dari penurunan aktiva tetap ataupun peningkatan jumlah aktiva tetap. Biaya depresiasi aset tetap ini menjadi penambah beban perusahaan dan memperkecil laba (Anggraini et al., 2020).

Capital intensity menunjukkan seberapa besar dana perusahaan yang digunakan untuk berinvestasi pada aset tetap seperti gedung, mesin, atau peralatan. Hal ini biasanya diukur dengan membandingkan jumlah aset tetap terhadap total aset perusahaan (Yasmin & Fitriyah, 2024). Berikut rasio yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Capital\ intensity = \frac{Total\ Aset\ Tetap}{Total\ Aset}$$

3.2.1 Variabel Terikat

Variabel terikat ialah jenis variabel dalam penelitian yang nilai ataupun perubahannya bergantung pada ataupun terpengaruh variabel lain. Pada konteks analisis hubungan antarvariabel, variabel terikat berperan sebagai hasil ataupun output yang dipaparkan oleh keberadaan dan perubahan dari variabel bebas, yaitu variabel yang memberikan pengaruh ataupun menjadi faktor penentu atas variabel terikat tersebut. Hal ini diperkuat dengan pendapat Sugiyono (2020), variabel terikat yakni variabel yang dijadikan hasil ataupun efek dari manipulasi ataupun pengaruh variabel bebas. Variabel ini dipakai guna menilai dampak ataupun hubungan yang dihasilkan oleh variabel bebas. Dalam studi ini, variabel yang dijadikan fokus utama variabel terikat adalah tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak sendiri merupakan strategi legal yang dilaksanakan oleh perusahaan guna meminimalkan beban pajak yang seharusnya disetorkan kepada negara, dengan cara memanfaatkan kelemahan

atau kekosongan dalam sistem peraturan perpajakan yang berlaku (Kimsen *et al.*, 2019).

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, yaitu perbandingan antara pembayaran pajak penghasilan dan laba sebelum pajak. Nilai *CETR* yang lebih rendah menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi (Susandy Anggraeni, 2018).

$$CETR = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi yakni keseluruhan objek ataupun individu yang mempunyai karakteristik tertentu yang dijadikan fokus dalam penelitian. Populasi mencakup seluruh elemen yang berdasarkan topik yang diteliti dan akan dipakai sebagai dasar guna menarik kesimpulan. Menurut Sugiyono (2020), Populasi dalam penelitian merujuk pada keseluruhan wilayah generalisasi yang terdiri atas sekumpulan objek ataupun subjek yang mempunyai kesamaan dalam hal karakteristik, ciri, ataupun kualitas tertentu, dan dianggap relevan guna menjadi unit analisis. Dengan kata lain, populasi mencakup semua elemen yang bisa memberikan informasi ataupun data yang dibutuhkan guna memberikan jawaban rumusan masalah dalam penelitian. Sehingga populasi berperan sebagai sumber data utama yang akan dijadikan dasar dalam proses analisis dan penarikan kesimpulan. Pada penelitian

ini, populasi yang dipakai yakni data time series ataupun data runtunan waktu, yang merepresentasikan rangkaian data sesuai urutan waktu tertentu. Adapun populasi yang dimaksud mencakup seluruh perusahaan yang bergerak di sektor energi dan sudah tercatat secara resmi sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni 91 perusahaan.

3.2.2 Sampel

Sampel yakni bagian dari populasi yang diambil guna mewakili populasi pada penelitian. Menurut Sugiyono (2020), sampel yakni bagian kecil dari populasi yang mempunyai karakteristik yang sama dengan populasi. Sampel dipakai guna mempermudah proses penelitian sebab mengumpulkan data dari seluruh populasi sering kali tidak praktis ataupun terlalu mahal. Sampel yang diambil pada penelitian ini ialah subset dari populasi, yaitu perusahaan pada sektor energi yang terdata di BEI dan mencukupi kriteria penelitian. Proses pemilihan sampel pada penelitian ini dilaksanakan dengan memakai metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan ataupun kriteria tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Berikut kriteria sampel pada penelitian ini:

1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 – 2024.

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara konsisten di tahun 2021 – 2024.
3. Perusahaan yang memenuhi kriteria variabel penelitian.

Perusahaan yang memenuhi kriteria variabel penelitian adalah perusahaan yang tidak mencantumkan informasi mengenai kepemilikan saham institusional dan perusahaan yang mengalami kerugian selama periode penelitian. Kepemilikan institusional merupakan salah satu variabel utama yang dianalisis, sehingga perusahaan yang tidak menyajikan data tersebut tidak dapat dijadikan sampel. Selain itu, perusahaan yang mengalami kerugian juga dikeluarkan dari penelitian karena perusahaan yang tidak memperoleh laba umumnya tidak memiliki beban pajak yang signifikan, sehingga kurang relevan untuk dianalisis dalam konteks penghindaran pajak. Dengan demikian, pengecualian ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian akurat, lengkap, dan sesuai dengan tujuan analisis.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini yakni jenis penelitian kuantitatif yang memakai informasi numerik yang kemudian diolah memakai aplikasi statistik. Jenis data pada penelitian ini memakai data sekunder yang berasal dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Data sekunder yakni data yang sudah dihimpun serta diproses oleh pihak lain sebelumnya dan dipakai oleh peneliti guna kebutuhan penelitian mereka. Data ini umumnya

didapatkan dari sumber-sumber yang sudah tersedia, layaknya laporan tahunan, publikasi pemerintah, data statistik, ataupun data yang sudah dipublikasikan oleh lembaga lain. Menurut Sugiyono (2020), data sekunder yakni data yang dipakai guna memberikan jawaban masalah penelitian yang berasal dari sumber lain yang sudah terdokumentasi sebelumnya. Pemakaian data sekunder bisa memberikan penghematan biaya serta waktu pada pengumpulan data, sebab data tersebut sudah ada serta bisa diakses oleh peneliti.

Sumber data didapatkan dari laporan tahunan yang terdata di BEI. Laporan tahunan ini menjadi sumber data yang menyediakan informasi lengkap mengenai keadaan keuangan perusahaan, neraca, laporan laba rugi, serta informasi mengenai kepemilikan saham, yang akan dipakai guna menganalisis *leverage*, kepemilikan institusional serta *capital intensity*. Selain itu, informasi mengenai penghindaran pajak akan didapatkan dari data laporan pajak yang dipublikasikan perusahaan, yang bisa dinilai melalui proksi *Cash Effective Tax Rate (CETR)*.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2020) memaparkan jika pengumpulan data merupakan salah satu tahap krusial dalam penelitian yang tujuannya ialah memperoleh informasi yang valid serta sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada studi ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai sarana guna menghimpun data. Teknik tersebut dilaksanakan dengan cara menelusuri dokumen-dokumen tertulis yang telah tersedia sebelumnya dan relevan dengan topik penelitian.

Adapun jenis data yang dipakai adalah data sekunder, yang berasal dari laporan keuangan tahunan sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor energi serta telah tercatat secara resmi sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI). Semua data yang dianalisis yang ada pada kurun waktu tertentu, yang telah disesuaikan dengan batas waktu yang ditetapkan dalam cakupan penelitian ini. Data *leverage* dinilai dengan rasio utang atas ekuitas, kepemilikan institusional didapatkan dari bagian laporan kepemilikan saham pada *annual report*, serta *capital intensity* diambil dari total aset tetap dan total aset setiap perusahaan. Variabel penghindaran pajak dinilai memakai proksi *Cash Effective Tax Rate (CETR)* yang dihitung dari rasio pajak yang dibayarkan dan laba sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan. Sumber data utama dalam penelitian ini bermula dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) (www.idx.co.id).

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Sugiyono (2020) memaparkan jika Statistik deskriptif merupakan salah satu metode analisis yang difokuskan dalam variabel bebas, baik itu satu variabel maupun lebih, tanpa perlu memberikan pembandingannya dengan variabel lain ataupun mengeksplorasi keterkaitannya. Teknik ini bertujuan guna menggambarkan data secara sistematis dan informatif.

Dalam penerapannya, analisis ini melibatkan sejumlah ukuran seperti nilai maksimum, minimum, standar deviasi, serta rata-rata (*mean*). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik setiap variabel bebas yakni *leverage*,

kepemilikan institusional, dan *capital intensity* guna menilai apakah ketiganya mempunyai pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak selama periode 2021 hingga 2024.

3.5.2 Regresi Linear Berganda

Pendekatan regresi linear berganda ialah metode analisis statistik yang dipakai guna meneliti hubungan antara satu variabel terikat dua ataupun lebih variabel bebas dalam penelitian kuantitatif. Menurut Ghozali (2021), regresi berganda mempunyai tujuan guna menilai pengaruh variabel bebas secara simultan maupun parsial atas variabel terikat melalui pertimbangan faktor lain yang mungkin memberikan pengaruh hubungan tersebut. Hal ini bisa dimaknai jika model ini berguna pada penelitian ekonomi dan keuangan sebab mampu memperlihatkan hubungan yang lebih kompleks dibandingkan regresi sederhana.

Penelitian ini mempunyai variable terikat yaitu Penghindaran Pajak serta variabel bebas yang mencakup *capital intensity*, *leverage*, serta kepemilikan institusional. Sehingga bisa dinyatakan menjadi persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Penghindaran Pajak

α = Konstanta

X1 = *Leverage*

X_2	= Kepemilikan Institusional
X_3	= <i>Capital intensity</i>
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien Regresi
e	= Error

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ialah serangkaian uji yang dipakai pada analisis regresi guna memberikan kepastian jika model regresi linear berganda yang dipakai mencukupi persyaratan statistik tertentu, sehingga hasil yang didapatkan valid serta bisa diandalkan. Ghazali (2021) memaparkan jika uji asumsi klasik mempunyai tujuan guna memberikan kepastian jika hubungan yang dianalisis antara variabel bebas serta variabel terikat tidak mengalami penyimpangan ataupun distorsi akibat terdapatnya permasalahan dalam data yang dipakai, layaknya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi dasar dalam regresi. Pada penelitian ini, uji asumsi klasik menjadi langkah yang penting guna menjamin jika model regresi yang dipakai guna menganalisis pengaruh *leverage*, kepemilikan institusional, dan *capital intensity* atas praktik penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan di sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) mampu menghasilkan estimasi yang mempunyai sifat valid, akurat, dan bebas dari bias. Widarjono (2022) menyatakan bahwa uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas yakni uji yang dipakai pada analisis regresi guna memberikan kepastian jika residual ataupun kesalahan prediksi dalam model regresi berdistribusi normal. Ghozali (2021) memaparkan jika distribusi normal pada residual sangat penting pada analisis regresi linear berganda sebab memberikan kepastian jika hasil estimasi koefisien regresi tidak bias serta bisa dipercaya. Uji normalitas dilaksanakan dengan berbagai metode yang umum dipakai, satu darinya yakni uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikasinya melebihi 0,05 ($>0,05$), maka bisa dinyatakan jika sebaran datanya normal (Ghozali, 2021).

Penelitian ini dalam pengujian normalitas memakai data uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Berikut kriteria nilai K-S (Ghozali, 2021) yaitu:

1. Nilai K-S dengan probabilitas signifikansi 0.000 serta nilainya > 0.05 maka hipotesis ditolak ataupun variabel tidak terdistribusi secara normal.
2. Nilai K-S dengan probabilitas signifikansi 0.000 serta nilainya < 0.05 maka hipotesis diterima ataupun variabel terdistribusi secara normal.

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas

Salah satu jenis pengujian dalam asumsi klasik yang penting dalam regresi ialah uji multikolinearitas, yang dipakai guna

mendeteksi terdapatnya keterkaitan linear yang kuat di antara dua atau lebih variabel bebas. Tujuan dilaksanakannya pengujian ini ialah guna memastikan jika antar variabel bebas dalam model regresi tidak ada korelasi tinggi yang bisa mengganggu keakuratan analisis. Widarjono (2022) memaparkan jika Ketika ada dua ataupun lebih variabel bebas dalam model regresi yang mempunyai tingkat korelasi yang sangat tinggi satu sama lain, maka kondisi tersebut dikenal sebagai multikolinearitas. Keberadaan multikolinearitas bisa menimbulkan permasalahan pada analisis, sebab menyulitkan peneliti guna mengidentifikasi serta menilai secara tepat kontribusi ataupun pengaruh setiap variabel bebas atas variabel terikat. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya tumpang tindih informasi di antara berbagai variabel bebas yang saling berkorelasi tinggi, sehingga estimasi yang dihasilkan menjadi kurang dapat diandalkan.

Satu dari metode yang umum dipakai guna mengidentifikasi terdapatnya multikolinearitas dalam model regresi yakni dengan menerapkan *Variance Inflation Factor* (VIF). *Variance Inflation Factor* ini berfungsi guna menilai tingkat peningkatan varians dari koefisien regresi yang terjadi sebagai akibat dari korelasi yang tinggi antar variabel bebas dalam model tersebut. Dengan kata lain, VIF memperlihatkan besarnya variabilitas estimasi koefisien regresi menjadi melebihi sebab terdapatnya hubungan yang saling mengenai antara berbagai variabel bebas yang dipakai.

Sugiyono (2020) memaparkan jika nilai VIF yang tinggi memperlihatkan terdapatnya multikolinearitas dalam model regresi. Secara umum, jika nilai VIF variabel melebihi 10, maka bisa dinyatakan jika ada multikolinearitas signifikan antara variabel tersebut dengan variabel yang lain dalam model. Sehingga uji multikolinearitas bisa dilaksanakan dengan menghitung nilai VIF guna setiap variabel bebas dalam model regresi.

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yakni satu dari uji asumsi klasik yang dilaksanakan pada analisis regresi guna memberikan kepastian jika varians residual (kesalahan) dalam model regresi mempunyai sifat konstan pada semua level variabel bebas. Heteroskedastisitas terjadi jika varians residual tidak konstan ataupun berubah-ubah pada level yang berbeda dari variabel bebas. Ghazali (2021) memaparkan jika heteroskedastisitas yang tidak terdeteksi dapat menghasilkan estimasi yang tidak efisien, sehingga memberikan gangguan validitas hasil penelitian.

Dalam melaksanakan uji heteroskedastisitas, satu dari metode yang sering dipakai yakni uji grafik scatterplot antara nilai residual serta nilai prediksi dari model regresi. Sugiyono (2020) memaparkan jika jika grafik scatterplot memperlihatkan pola yang tidak teratur ataupun menyebar acak, maka bisa dinyatakan jika tidak ada heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika grafik

memperlihatkan pola yang sistematis ataupun membangun sebuah pola tertentu, maka dapat menandakan terdapatnya heteroskedastisitas.

3.5.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi yakni satu dari uji asumsi klasik pada analisis regresi yang mempunyai tujuan guna mendeteksi terdapatnya korelasi antara nilai residual (kesalahan) pada periode ataupun observasi yang satu dengan observasi yang lain. Tujuan utama dari uji autokorelasi yakni guna mengidentifikasi apakah kesalahan dalam model regresi di masa lalu mempunyai pengaruh pada kesalahan yang terjadi pada periode berikutnya. Widarjono (2022) memaparkan jika ada autokorelasi dalam model, maka model regresi yang dipakai tidak akan memberikan hasil yang optimal sebab estimasi koefisiennya menjadi tidak efisien. Sehingga uji autokorelasi dilaksanakan guna memberikan kepastian jika kesalahan residual tidak saling mengenai dan jika model regresi yang dipakai pada penelitian ini bisa memberikan estimasi yang akurat serta bisa diandalkan, khususnya dalam menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, *leverage* serta *capital intensity* atas penghindaran pajak.

Pada penelitian ini, metode yang dipakai guna mendeteksi terdapatnya autokorelasi yakni uji *Durbin-Watson* (DW). Azwarini (2023) memaparkan jika prinsip kerja dari uji *Durbin-Watson* yaitu

didasarkan pada pengamatan dan pengujian terhadap nilai residual dari model regresi atau analisis deret waktu. Residual adalah selisih antara nilai observasi aktual dan nilai prediksi yang dihasilkan oleh model. Uji Durbin-Watson digunakan untuk mendeteksi adanya pola ketergantungan atau autokorelasi dalam residual tersebut dengan rumus $dL < d < 4-dU$.

3.5.4 Uji Hipotesis

Pada penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan peneliti melalui uji signifikansi parsial (Uji T) dan uji signifikansi simultan (Uji F).

3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2021), Pengujian terhadap koefisien determinasi (R^2) ialah langkah analisis statistik yang mempunyai tujuan guna melihat seberapa jauh kemampuan model regresi, khususnya berbagai variabel bebas yang dipakai pada penelitian, saat memaparkan ataupun memberikan pengaruh variasi yang terjadi dalam variabel terikat. Dengan kata lain, koefisien determinasi ini memperlihatkan proporsi variasi dari variabel terikat yang bisa dipaparkan oleh kombinasi dari berbagai variabel bebas dalam model. Nilai dari koefisien determinasi (R^2) yang ada pada rentang antara 0 sampai 1. Jika nilai R^2 mendekati angka 1, maka hal ini memperlihatkan jika model yang dibangun mempunyai kemampuan yang sangat baik saat memaparkan perubahan ataupun fluktuasi dalam variabel terikat, sebab hampir seluruh informasi yang dibutuhkan

guna memberikan prediksi variabel terikat sudah terkandung dalam berbagai variabel bebasnya. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati 0, maka hal tersebut menandakan jika kontribusi ataupun pengaruh dari berbagai variabel bebas saat memaparkan variabel terikat sangatlah kecil, ataupun bahkan hampir tidak ada, sehingga model tidak cukup baik dalam memprediksi variabel dependen berdasarkan variabel independen yang digunakan.

3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (F-test)

Uji F yakni satu dari uji statistik pada analisis regresi yang dipakai guna melaksanakan pengujian signifikansi pengaruh variabel bebas secara simultan atas variabel terikat. Ghozali (2021) memaparkan jika uji F dilaksanakan melalui perbandingan variasi yang dipaparkan oleh model regresi terhadap variasi yang tidak dapat dipaparkan oleh model. Tujuan utama dari uji F yakni guna menilai apakah variabel bebas yang dipakai pada penelitian mempunyai pengaruh signifikan secara simultan atas variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusan pada uji F berdasarkan nilai probabilitas (p-value) serta nilai F-hitung yang didapatkan dari hasil pengujian regresi. (Sugiyono, 2020) menyebutkan jika:

1. $p\text{-value} \leq 0,05$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak, yang memperlihatkan bahwa variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

2. $p\text{-value} > 0,05$, maka H_0 diterima, yang artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh signifikan atas variabel terikat.
3. $F\text{-hitung}$ melebihi $F\text{-tabel}$, maka H_0 juga ditolak, yang menandakan jika model regresi mempunyai tingkat signifikansi yang memadai.

3.5.4.3 Uji Parsial (T – Test)

Uji T ialah satu dari metode statistik pada analisis regresi yang dipakai guna melaksanakan pengujian signifikansi pengaruh setiap variabel bebas secara parsial atas variabel terikat. Tujuan dari uji ini yakni guna menilai apakah *capital intensity*, *leverage*, serta kepemilikan institusional secara individu mempunyai pengaruh signifikan atas penghindaran pajak. Ghazali (2021) memaparkan jika uji T memberikan perbandingan nilai koefisien regresi serta kesalahan standar guna menetapkan apakah variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan atas variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusan pada uji T berdasarkan nilai probabilitas ($p\text{-value}$) serta nilai $t\text{-hitung}$. (Sugiyono, 2020) menyebutkan jika:

1. $P\text{-value} \leq 0,05$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak, yang artinya jika variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh signifikan atas variabel terikat.

2. $P\text{-value} > 0,05$, maka hipotesis nol diterima, yang artinya jika variabel bebas secara individu tidak mempunyai pengaruh signifikan atas variabel terikat.
3. Jika $t\text{-hitung}$ melebihi $t\text{-tabel}$, maka hipotesis nol juga ditolak, yang menandakan jika variabel tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas variabel terikat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini memakai data sekunder dari berbagai perusahaan sektor energi yang terdata di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021- 2024. Pemilihan sampel dilaksanakan memakai metode *purposive sampling*. Dari kriteria yang sudah ditentukan, jumlah sampel yang didapatkan pada penelitian ini yakni 80 data.

Hasil serta pembahasan pada bab ini menyajikan analisis data atas variabel bebas serta terikat dengan memakai teknik analisis jalur melalui perangkat lunak SPSS versi 30.

Tabel 4.1 Kriteria Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	91
2	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara konsisten di tahun 2021 - 2024	(20)
3	Perusahaan yang memenuhi kriteria variabel penelitian (yang tidak mencantumkan kepemilikan institusional dan mengalami kerugian)	(51)
Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel penelitian		20
Total sampel penelitian 20 x 4 tahun		80

4.2 Analisis Data

4.2.1 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yakni alat statistik yang dipakai guna menganalisa berbagai variabel penelitian dengan memberikan deskripsi ataupun gambaran berupa nilai standar deviasi, maksimum, minimum, serta rata-rata (Ghozali, 2021). Hasil uji deskriptif bisa terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
<i>LEVERAGE</i>	80	.06	3.62	.8634	.73598
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	80	.14	.98	.5985	.22596
<i>CAPITAL INTENSITY</i>	80	.00	.86	.3558	.29721
PENGHINDARAN PAJAK	80	.00	.88	.3089	.22478
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Hasil Output SPSS 30 Data Diolah (2025)

Tabel 4.2 memperlihatkan sampel dengan jumlah yakni 80 data. Dari pengujian data tersebut maka dapat dipaparkan yakni:

1. *Leverage*

Leverage sebagai variabel bebas pertama (X1) mendapatkan nilai paling rendah sebesar 0.06 dan nilai paling tinggi sebesar 3,62. *Leverage* mempunyai nilai rata-rata sebesar 0.8634 serta nilai standar deviasi sebesar 0.73598.

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional sebagai variabel bebas kedua (X2) mendapatkan nilai rata-rata sebesar 0.5985 serta nilai standar deviasi sebesar 0.22596. Kepemilikan Institusional mempunyai nilai terendah sebesar 0.14 dan nilai tertinggi sebesar 0.98.

3. *Capital intensity*

Capital intensity sebagai variabel independen ketiga (X3) mendapatkan nilai rata-rata 0.3558 serta nilai standar deviasi 0.29721. *Capital intensity* mempunyai nilai paling rendah 0.00 serta nilai paling tinggi 0.86.

4. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak sebagai variabel terikat (Y) mendapatkan nilai rata-rata 0.3089 serta nilai standar deviasi 0.22478. Penghindaran Pajak mempunyai nilai paling rendah 0.00 serta nilai paling tinggi 0.88.

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilaksanakan guna melihat apakah data yang dipakai mencukupi asumsi-asumsi dasar. Pengujian yang dilaksanakan yakni uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, serta uji autokorelasi.

4.2.2.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas mempunyai tujuan guna melaksanakan pengujian apakah variabel bebas (*Leverage*, Kepemilikan

Institusional serta *capital intensity*), serta variabel terikat (Penghindaran Pajak) mempunyai distribusi normal ataupun tidak. Pada penelitian ini, guna melihat hasil uji normalitas maka dengan *One-sample Kolmogorov-Smirnov* yakni:

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		80	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.20414274	
Most Extreme Differences	Absolute	.080	
	Positive	.080	
	Negative	-.047	
Test Statistic		.080	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.225	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.215
		Upper Bound	.236

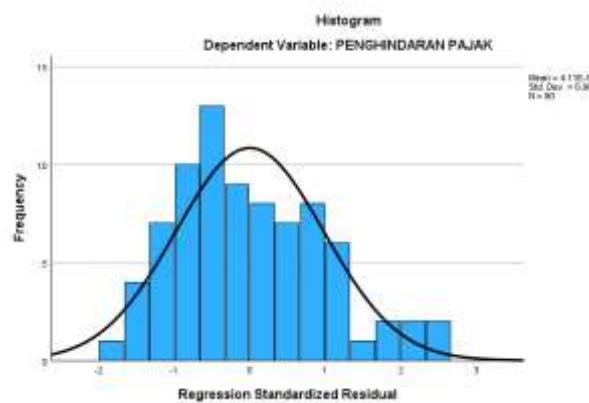
Sumber: Hasil Output SPSS 30 Data Diolah (2025)

Dari tabel 4.3 diperlihatkan jika nilai residual dari uji normalitas guna setiap variabel pada total 80 unit analisis yakni 0,200, hal ini memperlihatkan jika nilai signifikansi $0,200 > 0,05$ maka bisa dinyatakan jika data tersebut berdistribusi normal.

Pengujian normalitas selain *One-sample Kolmogorov Smirnov (K-S) Test* yakni dengan memakai pendekatan

histogram dengan melihat dari residual. Histogram ialah grafik yang menginterpretasikan distribusi frekuensi ataupun proporsi set data. Pengambilan keputusan didasari oleh pola distribusinya, jika grafik histogram memperlihatkan pola distribusi normal, maka model regresi mencukupi asumsi normalitas. Berikut yakni gambar dari hasil pengujian normalitas dengan memakai pendekatan histogram.

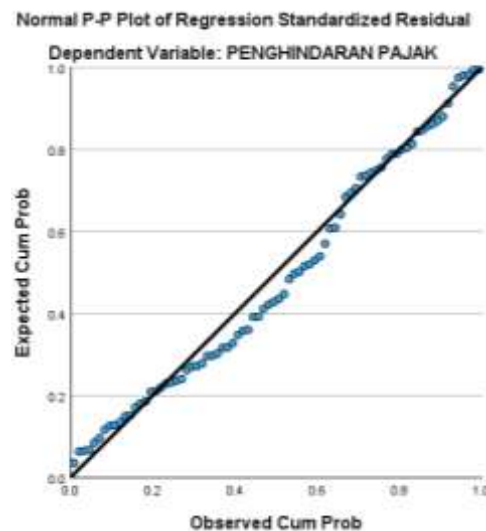
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Output SPSS 30 Data Diolah (2025)

Dari gambar 4.1 terlihat jika distribusi observasi menyerupai dengan kurva yang berbentuk normal ataupun berbentuk layaknya lonceng. Sehingga bisa dinyatakan model regresi ini dinyatakan bebas uji normalitas. Hasil uji melalui grafik histogram didukung memakai uji normalitas metode normal probability plot (P-Plot). Adapun hasil uji melalui metode P-Plot.

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Output SPSS 30 Data Diolah (2025)

Dari gambar 4.2 Normal Probability Plot P-Plot terlihat arah titik-titik data menuju garis diagonal yang bisa dinyatakan jika data tersebut sudah terdistribusi normal.

4.2.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji pada penelitian ini dilaksanakan dengan memakai Variance Inflation Factor (VIF) serta Tolerance. Jika nilai Tolerance $> 0,10$ ataupun nilai VIF < 10 , bisa dinyatakan jika tidak ada multikolonieritas. Adapun hasil uji multikolonieritas:

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	<i>LEVERAGE</i>	.825	1.212
	KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	.840	1.190
	<i>CAPITAL INTENSITY</i>	.913	1.095

Sumber: Hasil Output SPSS 30 Data Diolah (2025)

Dari tabel 4.4 didapatkan hasil jika *leverage* mempunyai nilai tolerance $0,825 > 0,10$ serta nilai VIF $1,212 < 10$, pajak restoran mempunyai nilai tolerance $0,840 > 0,10$ serta nilai VIF $1,190 < 10$, dan pajak hiburan mempunyai nilai tolerance $0,913 > 0,10$ serta nilai VIF $1,095 < 10$.

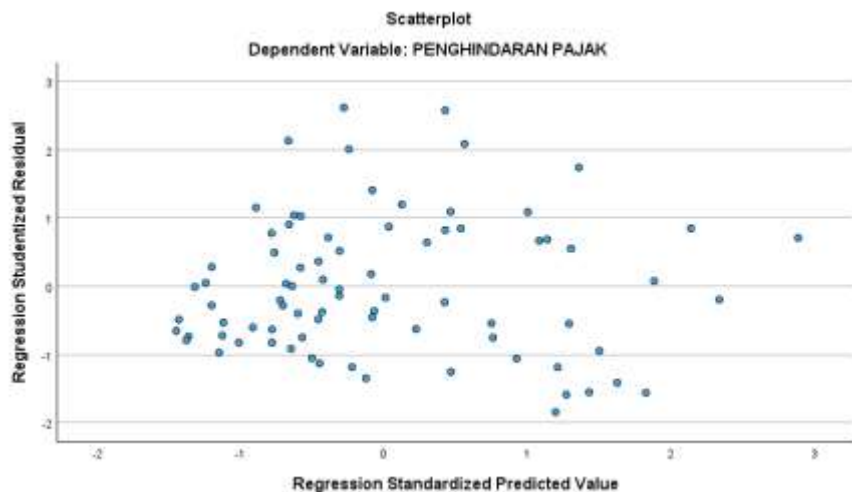
Hasil uji multikolinearitas dalam tabel 4.4 memperlihatkan jika nilai tolerance dalam variabel bebas yaitu pajak kepemilikan institusional, *leverage*, serta *capital intensity* mempunyai nilai tolerance $> 0,10$ serta nilai VIF < 10 , sehingga dinyatakan jika hasil uji tersebut sudah terpenuhi sehingga tidak ada korelasi yang tinggi antar variabel bebas, maka bisa dinyatakan pada penelitian ini tidak ada multikolinearitas.

4.2.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan guna melaksanakan pengujian apakah ada perbedaan dalam varians dari residual antar observasi dalam model regresi. Metode regresi yang dipakai guna mendeteksi terdapatnya heteroskedastisitas dilaksanakan dengan melihat pola penyebaran titik-titik dalam grafik scatterplot. Jika titik-titik tersebut menyebar acak serta tidak membangun pola tertentu di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka bisa dinyatakan jika tidak ada

heteroskedastisitas. Adapun hasil uji heteroskedastisitas memakai grafik scatterplot:

Gambar 4.3 Hasil Uji Scatterplot



Sumber: Hasil Output SPSS 30 Data Diolah (2025)

Dari hasil uji heteroskedastisitas yang memakai uji scatterplot dalam gambar memperlihatkan pada grafik scatterplot bisa dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, dimana titik-titik yang ada diantara atas dan bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y serta tidak mengikuti pola tertentu ataupun bisa dinyatakan menyebar. Dengan demikian bisa dinyatakan jika tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian.

4.2.2.4 Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilaksanakan guna melihat apakah ada hubungan antara kesalahan dalam periode t melalui kesalahan pada periode sebelumnya ($t-1$). Pada penelitian ini, pengujian autokorelasi dilaksanakan dengan memakai uji Durbin-Watson.

Jika nilai d yang ada di antara dL dan $4 - dU$, maka bisa dinyatakan jika tidak ada autokorelasi. Adapun hasil dari uji autokorelasi:

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.419 ^a	.175	.143	.20813	1.579

Sumber: Hasil Output SPSS 30 Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas memperlihatkan nilai Durbin-Watson 1,579. Nilai tersebut nantinya akan dibuat perbandingan memakai signifikansi 5% dengan jumlah sampel 80 (n) serta jumlah variabel bebas 3 ($k=3$), maka dalam tabel DW didapatkan nilai dU 1,7153 serta dL sebesar 1,5600, kemudian nilai $4-dU$ ($4-1,7153$) 2,2847. Hasil tersebut bisa didapatkan $dL < d < dU$ ataupun $1,5600 < 1.579 < 2,2847$, maka tidak ada hubungan kesalahan pengganggu dalam periode sekarang ini dengan periode sebelumnya atau observasi yang berurutan sepanjang waktu tidak terkait satu sama lain, serta bisa dinyatakan jika tidak ada autokorelasi pada penelitian.

4.2.3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda dipakai guna memaparkan hubungan diantara *Leverage*, Kepemilikan Institusional, dan *Capital intensity* terhadap Penghindaran Pajak sebagai variabel terikat. Hasil analisis regresi linear berganda bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

<i>Coefficients^a</i>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.365	.090		4.071	<.001
<i>LEVERAGE</i>	.075	.035	.245	2.134	.036
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	-.105	.113	-.106	-.929	.356
<i>CAPITAL INTENSITY</i>	-.164	.082	-.216	-1.984	.051

Sumber: Hasil Output SPSS 30 Data Diolah (2025)

Dari tabel 4.6 memperlihatkan hasil nilai konstanta guna persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini serta nilai 0,365, sementara nilai koefisien regresi serta nilai 0,075 guna *leverage* (X1), nilai koefisien regresi serta nilai -0,115 guna kepemilikan institusional (X2), serta nilai koefisien regresi serta nilai - 0,164 guna *capital intensity* (X3). Jadi bisa dinyatakan jika persamaan dari regresi linear berganda yakni:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + e$$

atau

$$Y = 0,365 + 0,075 - 0,115 - 0,164 + e$$

Hasil persamaan dari linear berganda tersebut bisa diinterpretasikan sebagai yakni:

- a. Nilai konstanta (a) sebesar 0,365 memperlihatkan *leverage* (X1), kepemilikan institusional (X2), dan *capital intensity* (X3) tidak mempunyai nilai atau mempunyai nilai nol, maka tingkat penghindaran pajak berada pada angka sebesar 0,0365.

- b. Nilai koefisien regresi variabel X1 mempunyai nilai positif (+) 0,075 yang artinya jika setiap peningkatan dalam variabel X1 akan diikuti oleh peningkatan dalam variabel Y, begitu pula sebaliknya.
- c. Nilai koefisien regresi variabel X2 mempunyai nilai negatif (-) 0,115 sehingga bisa dimaknai jika kenaikan dalam variabel X2 akan mengakibatkan penurunan dalam variabel Y, begitu pula sebaliknya.
- d. Nilai koefisien regresi variabel X2 mempunyai nilai negatif (-) 0,164 yang menandakan jika peningkatan dalam variabel X3 akan berdampak pada penurunan variabel Y, begitu pula sebaliknya.

4.2.4 Hasil Uji Hipotesis

4.2.4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dipakai guna menilai besarnya kemampuan model saat memaparkan variasi yang terjadi dalam variabel terikat. Pada penelitian ini, uji koefisien determinasi (R^2) dimanfaatkan guna melihat seberapa jauh pengaruh variabel bebas, yaitu *capital intensity*, *leverage*, serta kepemilikan institusional, atas penghindaran pajak. Berikut hasil uji R^2 yang diolah memakai SPSS versi 30:

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Model Summary^b</i>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.419 ^a	.175	.143	.20813

Sumber: Hasil Output SPSS 30 Data Diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 4.7, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,143 atau setara dengan 14,3%. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *leverage* (X1), kepemilikan institusional (X2), dan *capital intensity* (X3), secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi terhadap variabel terikat yaitu penghindaran pajak sebesar 14,3%. Dengan demikian, masih terdapat 85,7% variasi dari penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini dan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam analisis ini. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun variabel-variabel yang diteliti memiliki kontribusi terhadap penghindaran pajak, terdapat faktor-faktor lain yang lebih dominan dan perlu ditelusuri lebih lanjut dalam penelitian berikutnya.

4.2.4.2 Hasil Uji Simultan (F – Test)

Uji Anova atau uji F dilaksanakan guna melihat apakah bisa menguji melaksanakan pengujian signifikansi pengaruh berbagai variabel bebas atas variabel terikat. Dalam uji F ini nilai F_{hitung} harus melebihi pada F_{tabel} ataupun signifikansi uji $F < 0,05$ maka H_0 ditolak, ada pengaruh signifikan. Berikut yakni tabel uji signifikansi simultan (Uji Statistik F):

Tabel 4.8 Hasil Uji Simultan (F – test)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.699	3	.233	5.381	.002 ^b
	Residual	3.292	76	.043		
	Total	3.992	79			

Sumber: Hasil Output SPSS 30 Data Diolah (2025)

Dari tabel 4.8 memperlihatkan jika dapat dinyatakan peneliti memakai tingkat signifikan sebesar 5% atau $(\alpha) = 0.05$. Dari data di atas terlihat jika nilai F_{hitung} 5,381, sementara pada F_{tabel} di atas distribusi F atau df (*degree of freedom*) diperoleh 76 bahwa F_{tabel} sebesar 2,72. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $5,381 > 2,82$ dengan nilai sig. 0,002, maka dapat dinyatakan H_0 ditolak serta H_a diterima, artinya variabel bebas (X) secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel (Y).

4.2.4.3 Hasil Uji Parsial (T-test)

Uji T dilaksanakan guna melihat pengaruh variabel bebas melalui taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05). Guna melihat terdapatnya pengaruh dan besarnya pengaruhnya melalui perbandingan nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ ataupun signifikansi uji $T < 0,05$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak serta H_a diterima (mempunyai pengaruh signifikan). Berikut tabel uji parsial (Uji T):

**Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial (T test)
Coefficients^a**

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.365	.090		4.071	<,001
	<i>LEVERAGE</i>	.075	.035	.245	2.134	.036
	KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	-.105	.113	-.106	-.929	.356
	<i>CAPITAL INTENSITY</i>	-.164	.082	-.216	- 1.984	.051

a. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK

Sumber: Hasil Output SPSS 30 Data Diolah (2025)

Dari tabel 4.9 bisa didapatkan jika $df = 76$ ($df = n - k - 1$) ataupun ($df = 80 - 3 - 1$) yang memperlihatkan nilai T_{tabel} 1,991 dengan probabilitas satu arah (one tailed) yaitu 0,05. Dari hasil uji T dalam tabel diatas bisa terlihat bahwa:

- a. Nilai T_{hitung} variabel *leverage* (X1) 2,134 > nilai T_{tabel} yaitu 1,991 serta nilai sig yaitu $0,036 < 0,05$, maka H_0 ditolak serta H_a diterima, artinya *leverage* (X1) secara parsial mempunyai pengaruh positif atas penghindaran pajak (Y).
- b. Nilai T_{hitung} variabel kepemilikan institusional (X2) - 0,929 < nilai T_{tabel} yaitu 1,991 serta nilai sig yaitu $0,356 > 0,05$, maka H_0 diterima serta H_a ditolak, artinya kepemilikan institusional (X2) secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan atas penghindaran pajak (Y).
- c. Nilai T_{hitung} variabel *capital intensity* (X3) -1,984 < nilai T_{tabel} yaitu 1,991 serta nilai sig yaitu $0,051 > 0,05$, maka H_0

diterima dan H_a ditolak, artinya *capital intensity* (X3) secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak (Y).

4.3 Interpretasi Hasil

4.3.1 Pengaruh *Leverage* (X1) Terhadap Penghindaran Pajak (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi *leverage* sebesar 0,0036 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien 0,075 yang menandakan semakin tinggi *leverage*, maka semakin rendah *Cash Effective Tax Rate*, yang berarti bahwa perusahaan membayar pajak lebih kecil dibandingkan laba sebelum pajak, sehingga tingkat penghindaran pajak meningkat. Hal ini terjadi karena perusahaan memanfaatkan beban bunga dari utang sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Nilai standar deviasi *leverage* sebesar 0,73598 menunjukkan adanya variasi yang cukup besar dalam penggunaan utang antar perusahaan, mencerminkan beragamnya strategi struktur modal dan kecenderungan sebagian perusahaan memanfaatkan utang untuk efisiensi pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hal ini sejalan dengan teori yang digunakan peneliti yaitu teori agensi karena manajer dapat menggunakan utang sebagai alat kontrol terhadap penggunaan kas bebas yang berlebihan, serta sebagai strategi efisiensi pajak. Selain itu, bunga utang juga

merupakan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga perusahaan dengan *leverage* tinggi memiliki peluang lebih besar untuk menurunkan beban pajaknya. Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan, maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak juga semakin besar.

Penelitian terdahulu yang mendukung temuan ini adalah studi oleh (Tanamal & Nariman (2021) berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI" yang menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini memperkuat pemahaman bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki insentif lebih besar untuk melakukan strategi penghindaran pajak.

4.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional (X2) Terhadap Penghindaran Pajak (Y)

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui bahwa kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi sebesar 0,356 lebih besar dari 0,05 dan koefisien -0.105. Hal ini berarti menunjukkan bahwa arah hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak bersifat berlawanan, yaitu semakin tinggi kepemilikan institusional, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak cenderung menurun. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diproksikan dengan *Cash*

Effective Tax Rate (CETR), di mana semakin tinggi nilai *CETR* menunjukkan semakin rendahnya tingkat penghindaran pajak. Dengan demikian, hasil uji tersebut menggambarkan bahwa peningkatan kepemilikan institusional cenderung diikuti oleh peningkatan *CETR*, yang berarti praktik penghindaran pajak menurun. Nilai standar deviasi pada kepemilikan institusional sebesar 0,22596 hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan tingkat kepemilikan institusional tidak cukup kuat untuk memengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan strategi penghindaran pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan dalam penelitian ini.

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan serta kinerja manajemen. Semakin besar proporsi kepemilikan oleh institusi, maka semakin kuat suara dan pengaruh yang dimiliki institusi tersebut dalam mengawasi manajemen, sehingga mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan. Hasil tersebut sejalan dengan teori agensi karena menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan yang efektif, hal ini mencerminkan bahwa investor institusional mampu menekan perilaku oportunistik

manajer, termasuk dalam praktik penghindaran pajak, sehingga mendukung pandangan teori agensi tentang pengurangan konflik antara pemilik dan manajer.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anugrah dan Siagian (2023) berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Non-Kuangan di Bursa Efek Indonesia", yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan institusional masih bersifat situasional dan bergantung pada peran aktif masing-masing institusi.

4.3.2 Pengaruh *Capital intensity* (X3) Terhadap Penghindaran Pajak (Y)

Berdasarkan hasil uji hipotesis, *capital intensity* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,051 lebih besar dari 0,05 dan koefisien -0,164 menunjukkan bahwa semakin tinggi *capital intensity*, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak cenderung menurun. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, di mana semakin tinggi nilai *CETR* menunjukkan semakin rendahnya penghindaran pajak. Dengan demikian, hubungan negatif tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan *capital intensity* cenderung meningkatkan *CETR* dan menurunkan praktik penghindaran pajak,

Capital intensity memiliki standar deviasi sebesar 0,29721, yang menunjukkan terdapat perbedaan struktur aset tetap antar perusahaan yang cukup bervariasi namun tidak ekstrem, maka dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dalam penelitian ini.

Capital intensity yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat *capital intensity* tinggi justru lebih fokus menggunakan aset tetap tersebut untuk mendukung kegiatan operasional, bukan sebagai strategi dalam perencanaan pajak serta lebih patuh dalam membayar pajak karena memiliki aset tetap besar yang mudah teridentifikasi oleh otoritas pajak. Temuan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan teori agensi, yang beranggapan bahwa manajemen dapat menggunakan *capital intensity* sebagai salah satu instrumen dalam mengelola pajak secara agresif demi kepentingan pribadi maupun untuk menunjukkan kinerja yang efisien kepada pemilik. Dalam kenyataannya, hasil ini mengindikasikan bahwa potensi konflik kepentingan antara manajer dan pemilik terkait *capital intensity* tidak terlalu signifikan dalam hal penghindaran pajak.

Hal ini tidak sepenuhnya sejalan dengan teori agensi. Teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*), di mana manajer memiliki

kecenderungan untuk bertindak demi kepentingannya sendiri, termasuk dalam melakukan perencanaan pajak agresif guna menurunkan beban pajak perusahaan. Dalam konteks ini, intensitas modal yang tinggi umumnya memberikan peluang bagi manajer untuk memanfaatkan penyusutan aktiva tetap sebagai instrumen *tax planning*, akan tetapi penelitian yang mendukung hasil ini adalah studi oleh Firmansyah dan Bahri (2023) berjudul "Pengaruh *Leverage*, *Capital intensity*, dan *Sales Growth* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*", yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji beragam faktor yang mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di sektor energi. Variabel terikat yang dipakai yakni penghindaran pajak yang diukur melalui proksi *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, sedangkan variabel independennya meliputi *leverage*, kepemilikan institusional, dan *capital intensity*. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda. Objek penelitian berupa perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2021-2024. Sampel penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling*, sehingga diperoleh sebanyak 20 perusahaan yang memenuhi kriteria, menghasilkan total 80 data observasi selama periode tersebut. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Bab IV, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut

1. Hasil uji T diketahui *Leverage* pada perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024 secara parsial berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.
2. Hasil uji T diketahui Kepemilikan Institusional pada perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024 secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

3. Hasil uji T diketahui *capital intensity* pada perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024 secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
4. Berdasarkan hasil uji F dapat diketahui bahwa *leverage*, kepemilikan institusional, dan *capital intensity* secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini belum sepenuhnya sempurna dan masih memiliki beberapa kekurangan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah Nilai koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Pada penelitian ini, nilai R^2 tergolong sangat rendah, yakni sebesar 14,7%. Artinya, variabel independen belum mampu secara memadai menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, masih terdapat 83,3% variasi pada variabel dependen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

5.3 Saran

Mengingat nilai koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini masih tergolong rendah, yakni hanya sebesar 14,7%, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan belum mampu menjelaskan sebagian besar variasi pada variabel dependen secara memadai. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan perluasan atau

penambahan variabel lain yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak, sehingga model yang dibangun menjadi lebih komprehensif dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tarmizi, & Didin Hikmah Perkasa. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga, Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 112–122. <https://doi.org/10.56127/jekma.v1i2.277>
- Aditya, F. D., & Achmad, T. (2021). *the Influence of Internal and External Corporate Governance Mechanisms Towards Agency Cost in Indonesia*. 10, 1–8.
- Anggraini, F., Astri, N. D., & Minovia, A. F. (2020). Pengaruh strategi bisnis , capital intensity dan ultinationality terhadap tax avoidance. *Influence of Business Strategy , Capital Intensity and Ultinationality on Tax Avoidance*, XIV(02), 36–45.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). Fundamentals of Financial Management 15 Edition. In *Cengage Learning*.
- Chen, X., Harford, J., & Li, K. (2007). Monitoring: Which institutions matter? *Journal of Financial Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.09.005>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Dhini, V. A. (2022). No Title. In *Ini Tren Tax Ratio Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/ini-tren-tax-ratio-indonesia-dalam-5-tahun-terakhir>
- Erlisa, A., Hati Nurvi Archelly, D., Nur Nilamsari, I., Safira Adhani, T., Hasna Kurniawati, Z., & Amrulloh, A. (2024). The Effect of Profitability, Leverage, and Company Size on Tax Avoidance Agricultural Products Companies. *Journal Economic Business Innovation*, 1(2), 25–34. <https://doi.org/10.69725/jebi.v1i2.25>
- Ernawati, I., & Indriyanto, E. (2024). Tax Avoidance : Faktor Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensityid 2 *Corresponding Author. *Management*

- Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 5090–5105.
<http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Firmansyah, M. Y., & Bahri, S. (2023). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Sales Growth, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(3), 430–439.
<https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i3.53401>
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariete SPSS 26. In *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Gupta, S., & Newberry, K. (1997). Determinants of the variability in corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal data. *Journal of Accounting and Public Policy*. [https://doi.org/10.1016/S0278-4254\(96\)00055-5](https://doi.org/10.1016/S0278-4254(96)00055-5)
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
<https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing serta Intensitas Modal pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–12.
<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap> Jurnal
- Indarto, B. A., Ani, D. A., & Tantra, A. R. (2024). Pengaruh Leverage, Komisaris Independen, Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Konstruksi Terdaftar Bei 2020 – 2022. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(2), 1–8.
- Irmawati, & Abidin, J. (2025). No Title. *PENGARUH CAPITAL INTENSITY, FINANCIAL DISTRESS DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE*, 2, 528–552.
https://www.researchgate.net/publication/387804319_PENGARUH_CAPITAL_INTENSITY_FINANCIAL_DISTRESS_DAN_KONEKSI_POLITIK_TERHADAP_TAX_AVOIDANCE
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Jensen and Meckling. *The Corporate Financiers*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Kimsen, K., Kismanah, I., & Masitoh, S. (2019). Profitability, Leverage, Size of

- Company Towards Tax Avoidance. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 29–36. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v4i1.1075>
- Kurniawati, D., & Mukti, A. H. (2023). Pengaruh Thin Capitalization , Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Edukasi Nusantara ICMA*, 01(01), 44–50.
- Martalena, M., Iskandar, D., & Hadiano, B. (2023). Inflation, exchange rate, and stock return: The evidence from the LQ45 index constituents in Indonesia. *Owner*, 7(4), 2949–2955. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1859>
- Nirwasita, N., Durya, N. P. M. A., & Purwantoro, P. (2024). Pengaruh Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas Sebagai Moderasi (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 13190–13203.
- Pangemanan, D. R., & Watulingas, R. R. (2021). Penggelapan Pajak dan Proses Penegakan Hukum oleh Penyidik POLRI. *Lex Privatum*, 9(2), 203–213.
- Pound, J. (1988). Proxy contests and the efficiency of shareholder oversight. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(88\)90046-3](https://doi.org/10.1016/0304-405X(88)90046-3)
- Qin, Z., Liu, W., & Chen, M. (2022). Corporate Tax Avoidance and Firm Diversification: Evidence from Chinese Listed Firms. *Asian Economic Journal*. <https://doi.org/10.1111/asej.12257>
- Rahmawati, J., Manrejo, S., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei 2019-2021). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*.
- Salsabilla, S., & Nurdin, F. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Roa, Leverage Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Di Bei Tahun 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 151–174. <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.35353>
- Saraswati, F. D., & Utami, E. S. (2023). *Akurasi* 275.
- Sari, A. Y., Kinasih, H. W., Aditya, D., Pratiwi1, N. P. D., Mahaputra2, I. N. K. A., & Sudiartana3, I. M. (2021). Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Sales

- Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(1), 1609–1617.
- Sari, D., Wardani, R. K., Lestari, D. F., Sari, D., Wardani, R. K., & Lestari, D. F. (2021). *The-effect-of-leverage-profitability-and-company-size-on-tax-avoidance-An-empirical-study-on-mining-sector-companies-listed-on-indonesia-stock-exchange-period-201320192021Turkish-Journal-of-Computer-and-Mathematics-.pdf*. 12(4), 860–868.
- Selviana, D., & fidiana. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(3), 1–15. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>
- Septiana, A., & Zulkifli. (2024). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140–152.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A Survey of Corporate Governance. *The Journal of Finance*. <https://doi.org/10.2307/2329497>
- Sudjinan, Judijanto, L., & Wijaya, I. K. K. (2024). The Influence Of Institutional Ownership On Company Financial. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 435–440. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Suparyadi, R. A., & Rahardjo, S. N. (2024). *Pengaruh likuiditas, leverage, dan karakteristik perusahaan terhadap profitabilitas*. 13, 1–15.
- Susandy Anggraeni. (2018). Pengaruh Komisaris Independen , Leverage , Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi - V Ol . 10 . N O . 1 (2018)*, 1, 43–58., 1, 43–58. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto>
- Tanamal, J. J., & Nariman, A. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI Jose Juventius Tanamal* dan Augustpaosa Nariman. *Jurnal Mul*, III(4), 1498–1506.
- Widarjono, A. (2022). Profit-Loss Sharing Financing and Stability of Indonesian

- Islamic Banking. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v6i1.4196>
- Widawati, & Wahidahwati. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Kebijakan Perusahaan Dan Risiko Bisnis Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(8), 1–26.
- Wildan, M. (2023, April). No Title. *RI Perlu Perbaiki Tax Ratio Untuk Danai Pembangunan, Ini Strateginya*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/46936/ri-perlu-perbaiki-tax-ratio-untuk-danai-pembangunan-ini-strateginya>
- Yasmin, A. O., & Fitriyah, F. (2024). the Effect of Sales Growth, Capital Intensity and Leverage on Tax Avoidance. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 4(3), 359–373. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v4i3.676>
- Zakaria, M. A., & Muid, D. (2024). *Pengaruh Rasio Leverage , Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Manufaktur BEI Tahun 2019-2021*. 7(2).

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perusahaan Yang Memenuhi Kriteria

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Mata uang
1	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	Rp
2	BBRM	Pelayanan Nasional Bina Buana Tbk.	\$
3	BESS	Batulicin Nusantara Maritim Tbk.	Rp
4	BSML	Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk.	Rp
5	ENRG	Energi Mega Persada Tbk.	\$
6	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk.	\$
7	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk.	\$
8	MCOL	Prima Andalan Mandiri Tbk.	\$
9	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk.	\$
10	MITI	Mitra Investindo Tbk.	Rp
11	PSSI	IMC Pelita Logistik Tbk.	\$
12	RAJA	Rukun Raharja Tbk.	\$
13	RMKE	RMK Energy Tbk.	Rp

14	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk.	Rp
15	SGER	Sumber Global Energy Tbk.	Rp
16	SHIP	Sillo Maritime Perdana Tbk.	\$
17	SMMT	Golden Eagle Energy Tbk.	Rp
18	SOCI	Soechi Lines Tbk.	\$
19	TEBE	Dana Brata Luhur Tbk.	Rp
20	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.	\$

Lampira 1 Perhitungan *Leverage*

No	Kode	Tahun	Total Hutang	Total Ekuitas	LEV
1	AKRA	2021	12,209,620,623,000	11,298,965,113,000	1.0806
		2022	14,032,797,261,000	13,154,810,775,000	1.0667
		2023	16,253,614,293,000	14,042,957,513,000	1.1574
		2024	18,484,619,894,000	14,623,992,474,000	1.2640
2	BBRM	2021	249,195,346,274	115,797,201,612	2.1510
		2022	129,610,937,500	401,779,281,250	0.3226
		2023	77,271,762,515	457,915,386,060	0.1687
		2024	84,895,088,274	612,888,500,027	0.1385
3	BESS	2021	236,216,688,731	431,191,326,623	0.5478
		2022	280,314,393,366	492,352,056,536	0.5693
		2023	117,265,164,483	569,238,209,106	0.2060
		2024	66,436,633,891	595,850,694,380	0.1115
4	BSML	2021	154,128,325,905	94,557,515,350	1.6300
		2022	161,690,006,969	161,690,006,969	1.0000
		2023	131,661,285,020	123,539,921,112	1.0657
		2024	118,895,453,692	128,914,804,666	0.9223
5	ENRG	2021	8,787,015,722,514	6,413,896,446,792	1.3700
		2022	10,615,689,406,250	8,045,707,593,750	1.3194
		2023	12,148,797,620,040	9,001,840,686,545	1.3496
		2024	14,937,359,915,543	10,599,021,027,722	1.4093
6	KKGI	2021	475,175,946,186	1,413,180,491,616	0.3362
		2022	738,211,656,250	1,920,924,125,000	0.3843
		2023	941,498,967,655	2,143,756,007,945	0.4392
		2024	775,994,915,749	2,594,434,149,831	0.2991
7	MBAP	2021	824,827,610,508	2,856,966,581,046	0.2887
		2022	879,406,421,875	3,910,402,500,000	0.2249
		2023	872,527,243,405	2,658,340,256,845	0.3282

		2024	821,468,115,125	3,004,106,249,840	0.2734
8	MCOL	2021	2,484,825,724,092	5,751,786,847,722	0.4320
		2022	2,329,956,609,375	7,738,980,078,125	0.3011
		2023	2,449,501,005,225	9,010,416,070,155	0.2719
		2024	2,863,170,144,616	9,382,232,203,240	0.3052
9	MEDC	2021	63,637,668,127,908	17,562,300,681,846	3.6235
		2022	81,006,039,078,125	27,304,989,453,125	2.9667
		2023	83,705,481,461,645	31,194,564,336,920	2.6833
		2024	89,933,026,520,684	37,919,788,176,401	2.3717
10	MITI	2021	18,125,030,031	139,152,290,963	0.1303
		2022	81,035,237,770	393,997,822,554	0.2057
		2023	59,091,926,505	435,796,067,440	0.1356
		2024	59,109,449,848	434,677,617,291	0.1360
11	PSSI	2021	665,445,637,218	1,637,974,001,682	0.4063
		2022	523,114,640,625	2,279,298,593,750	0.2295
		2023	542,364,958,785	2,594,205,268,895	0.2091
		2024	505,130,828,446	2,552,294,314,756	0.1979
12	RAJA	2021	1,721,018,648,256	1,787,425,119,216	0.9628
		2022	1,991,389,734,375	2,078,994,250,000	0.9579
		2023	2,678,618,379,170	2,377,633,070,110	1.1266
		2024	2,572,383,210,062	2,771,971,568,949	0.9280
13	RMKE	2021	597,676,439,665	802,706,876,096	0.7446
		2022	470,171,083,609	1,206,664,294,807	0.3896
		2023	762,862,475,597	1,484,832,505,933	0.5138
		2024	642,242,858,297	1,729,169,046,628	0.3714
14	RUIS	2021	809,598,198,146	487,172,457,446	1.6618
		2022	743,817,825,130	523,731,475,008	1.4202
		2023	792,253,377,478	549,475,940,532	1.4418
		2024	845,895,951,156	555,285,149,249	1.5234
15	SGER	2021	802,902,534,546	434,182,013,309	1.8492

		2022	2,358,362,130,045	1,012,132,881,917	2.3301
		2023	3,037,542,632,520	1,481,767,794,177	2.0499
		2024	2,397,070,273,304	2,241,136,183,864	1.0696
16	SHIP	2021	2,494,466,288,328	2,155,145,702,052	1.1574
		2022	3,236,029,093,750	2,690,618,828,125	1.2027
		2023	3,641,786,026,990	6,649,097,823,290	0.5477
		2024	4,222,326,619,846	3,574,740,076,312	1.1812
17	SMMT	2021	233,792,851,055	817,847,583,715	0.2859
		2022	165,956,607,186	1,016,896,178,133	0.1632
		2023	208,339,830,993	799,523,779,947	0.2606
		2024	437,998,529,419	848,378,770,043	0.5163
18	SOCI	2021	3,739,538,303,556	5,249,355,885,018	0.7124
		2022	4,060,787,093,750	5,844,837,078,125	0.6948
		2023	3,412,096,377,200	5,885,113,970,325	0.5798
		2024	3,262,744,119,660	6,457,912,809,955	0.5052
19	TEBE	2021	175,196,520,000	813,864,394,000	0.2153
		2022	248,193,270,000	1,054,312,117,000	0.2354
		2023	63,811,093,000	1,087,089,561,000	0.0587
		2024	69,637,095,000	1,091,697,526,000	0.0638
20	TOBA	2021	7,198,380,493,302	5,060,463,021,522	1.4225
		2022	7,431,551,000,000	6,620,473,328,125	1.1225
		2023	8,064,049,026,955	6,518,434,418,325	1.2371
		2024	7,372,177,158,842	7,042,892,849,670	1.0468

Lampiran 2 Perhitungan Kepemilikan Institusional

No	Kode	Tahun	Saham Institusional	Saham Beredar	INS
1	AKRA	2021	2,392,626,120	4,014,694,920	0.5960
		2022	11,963,130,600	20,073,474,600	0.5960
		2023	12,077,492,600	20,073,474,600	0.6017
		2024	12,768,961,300	20,073,474,600	0.6361
2	BBRM	2021	2,821,175,739	5,367,076,248	0.5256
		2022	6,632,870,652	8,479,490,328	0.7822
		2023	6,632,870,652	8,479,490,328	0.7822
		2024	6,632,870,652	8,479,490,328	0.7822
3	BESS	2021	2,695,947,180	3,412,457,110	0.7900
		2022	3,017,932,380	3,433,061,158	0.8791
		2023	2,902,351,180	3,440,455,528	0.8436
		2024	2,902,351,180	3,440,455,528	0.8436
4	BSML	2021	999,120,000	1,850,225,000	0.5400
		2022	962,534,600	1,850,225,000	0.5202
		2023	858,663,195	1,850,225,000	0.4641
		2024	841,370,665	1,850,225,000	0.4547
5	ENRG	2021	12,744,081,890	24,821,230,250	0.5134
		2022	13,300,674,144	24,821,230,250	0.5359
		2023	14,257,557,261	24,821,230,480	0.5744
		2024	11,305,659,181	24,821,230,250	0.4555
6	KKGI	2021	1,275,940,065	4,693,452,715	0.2719
		2022	1,275,940,065	4,667,751,115	0.2734
		2023	1,336,147,500	4,667,751,115	0.2863
		2024	1,795,679,996	4,847,627,800	0.3704
7	MBAP	2021	736,363,152	1,227,271,952	0.6000
		2022	1,104,544,752	1,227,271,952	0.9000
		2023	1,104,544,752	1,227,271,952	0.9000

		2024	1,104,544,752	1,227,271,952	0.9000
8	MCOL	2021	3,168,000,000	3,555,560,000	0.8910
		2022	3,168,000,000	3,555,560,000	0.8910
		2023	3,168,000,000	3,555,560,000	0.8910
		2024	3,168,000,000	3,555,560,000	0.8910
9	MEDC	2021	12,982,184,624	25,136,231,252	0.5165
		2022	13,631,242,624	25,136,231,252	0.5423
		2023	12,974,184,624	25,029,499,884	0.5184
		2024	12,974,184,624	25,064,778,164	0.5176
10	MITI	2021	1,883,367,137	2,442,988,366	0.7709
		2022	2,772,155,016	3,540,735,503	0.7829
		2023	2,823,191,709	3,540,735,503	0.7973
		2024	2,823,191,709	3,540,735,503	0.7973
11	PSSI	2021	2,374,400,000	5,417,063,153	0.4383
		2022	2,374,400,000	5,417,063,153	0.4383
		2023	2,374,400,000	5,417,063,153	0.4383
		2024	2,374,150,000	5,417,063,153	0.4383
12	RAJA	2021	1,358,285,004	4,227,082,500	0.3213
		2022	1,846,279,476	4,227,082,500	0.4368
		2023	2,203,401,376	4,227,082,500	0.5213
		2024	1,992,411,404	4,227,082,500	0.4713
13	RMKE	2021	3,360,000,000	4,375,000,000	0.7680
		2022	3,360,000,000	4,375,000,000	0.7680
		2023	3,360,000,000	4,375,000,000	0.7680
		2024	3,360,000,000	4,375,000,000	0.7680
14	RUIS	2021	174,354,500	770,000,000	0.2264
		2022	174,354,500	770,000,000	0.2264
		2023	174,354,500	770,000,000	0.2264
		2024	174,354,500	770,000,000	0.2264
15	SGER	2021	1,066,333,333	1,959,514,668	0.5442

		2022	2,056,978,332	3,727,301,685	0.5519
		2023	2,185,539,477	4,364,335,706	0.5008
		2024	7,805,498,131	15,586,909,438	0.5008
16	SHIP	2021	2,219,790,000	2,719,790,000	0.8162
		2022	2,219,790,000	2,719,790,000	0.8162
		2023	2,219,790,000	2,719,790,000	0.8162
		2024	2,219,790,000	2,719,790,000	0.8162
17	SMMT	2021	2,635,030,695	3,150,000,000	0.8365
		2022	2,635,030,695	3,150,000,000	0.8365
		2023	3,090,530,067	3,150,000,000	0.9811
		2024	3,027,530,067	3,150,000,000	0.9611
18	SOCI	2021	5,640,000,000	7,059,000,000	0.7990
		2022	5,640,000,000	7,059,000,000	0.7990
		2023	4,708,522,504	7,059,000,000	0.6670
		2024	4,708,522,504	7,059,000,000	0.6670
19	TEBE	2021	599,198,272	1,285,000,000	0.4663
		2022	599,198,272	1,285,000,000	0.4663
		2023	599,198,272	1,285,000,000	0.4663
		2024	599,198,272	1,285,000,000	0.4663
20	TOBA	2021	1,271,103,444	8,049,964,000	0.1579
		2022	1,251,890,944	8,049,964,000	0.1555
		2023	1,171,390,944	8,106,700,622	0.1445
		2024	1,149,530,944	8,167,826,970	0.1407

Lampiran 3 Perhitungan *Capital intensity*

No	Kode	Tahun	Total Aset	Aset Tetap	CAP
1	AKRA	2021	23,508,585,736,000	4,978,381,223,000	0.2118
		2022	27,187,608,036,000	4,996,696,832,000	0.1838
		2023	30,296,571,806,000	5,466,446,896,000	0.1804
		2024	33,108,684,368,000	6,365,009,877,000	0.1922
2	BBRM	2021	480,673,927,572	347,308,003,164	0.7225
		2022	531,390,218,750	362,770,875,000	0.6827
		2023	535,187,148,575	377,122,258,590	0.7047
		2024	697,783,588,301	488,322,474,966	0.6998
3	BESS	2021	667,408,015,354	447,967,641,770	0.6712
		2022	772,666,449,902	533,294,808,204	0.6902
		2023	686,503,373,589	495,020,985,690	0.7211
		2024	662,287,328,271	455,860,916,876	0.6883
4	ENRG	2021	17,062,204,208,688	35,083,958,808	0.0021
		2022	16,625,665,171,875	72,014,968,750	0.0043
		2023	21,058,328,306,585	78,452,484,340	0.0037
		2024	25,536,380,943,265	1,149,428,797,912	0.0450
5	BSML	2021	248,685,841,255	199,786,525,486	0.8034
		2022	270,288,041,602	211,577,583,231	0.7828
		2023	255,201,206,132	208,637,028,640	0.8175
		2024	247,810,258,358	185,604,826,420	0.7490
6	KKGI	2021	1,888,356,437,802	288,772,675,338	0.1529
		2022	2,659,135,781,250	274,157,718,750	0.1031
		2023	3,085,254,975,600	362,102,144,635	0.1174
		2024	3,370,429,065,580	393,137,278,240	0.1166
7	MBAP	2021	3,681,794,191,554	271,403,656,536	0.0737

		2022	4,789,808,921,875	241,587,531,250	0.0504
		2023	3,530,867,500,250	207,627,436,710	0.0588
		2024	3,701,615,983,850	523,689,823,586	0.1415
8	MCOL	2021	8,236,612,571,814	2,145,756,199,980	0.2605
		2022	10,068,936,687,500	2,476,087,875,000	0.2459
		2023	11,459,917,075,380	3,197,302,253,635	0.2790
		2024	12,245,402,347,856	3,353,933,388,894	0.2739
9	MEDC	2021	81,199,968,809,754	719,615,520,594	0.0089
		2022	108,311,028,531,250	967,260,843,750	0.0089
		2023	114,900,045,798,565	995,029,582,810	0.0087
		2024	127,852,814,697,085	1,764,564,486,993	0.0138
10	MITI	2021	157,277,320,994	26,641,367,043	0.1694
		2022	475,033,060,324	145,610,801,877	0.3065
		2023	494,887,993,945	143,114,916,097	0.2892
		2024	493,787,067,137	138,001,431,990	0.2795
11	PSSI	2021	2,303,419,638,900	1,435,988,976,348	0.6234
		2022	2,802,413,234,375	1,733,457,515,625	0.6186
		2023	3,136,570,227,680	1,531,191,494,215	0.4882
		2024	3,057,425,143,202	1,222,313,990,851	0.3998
12	RAJA	2021	3,508,443,767,472	1,784,506,060,836	0.5086
		2022	4,070,383,984,375	2,240,509,359,375	0.5504
		2023	5,056,251,449,280	2,629,830,667,200	0.5201
		2024	5,344,354,779,011	2,708,138,890,163	0.5067
13	RMKE	2021	1,400,383,315,761	639,294,686,205	0.4565
		2022	1,676,835,378,416	631,354,285,084	0.3765
		2023	2,247,694,981,530	788,481,653,725	0.3508
		2024	2,371,411,904,925	848,829,813,358	0.3579
14	RUIS	2021	1,297,577,363,103	438,094,275,471	0.3376
		2022	1,267,549,300,138	346,096,283,932	0.2730

		2023	1,341,729,318,010	274,757,664,028	0.2048
		2024	1,401,181,100,405	205,972,801,426	0.1470
15	SGER	2021	1,237,084,547,855	23,247,255,600	0.0188
		2022	3,370,495,011,962	19,547,007,969	0.0058
		2023	4,519,310,426,697	116,879,882,543	0.0259
		2024	4,638,206,457,168	353,431,852,831	0.0762
16	SHIP	2021	4,649,611,990,380	3,673,868,890,194	0.7901
		2022	5,926,647,921,875	4,862,426,468,750	0.8204
		2023	6,649,097,823,290	5,523,442,436,455	0.8307
		2024	7,797,066,696,158	6,065,437,191,682	0.7779
17	SMMT	2021	1,051,640,434,770	12,756,164,573	0.0121
		2022	1,182,852,785,319	13,763,348,334	0.0116
		2023	1,007,863,610,940	14,742,165,598	0.0146
		2024	1,286,377,299,462	15,577,318,678	0.0121
18	SOCI	2021	8,988,894,188,574	7,215,511,607,346	0.8027
		2022	9,905,624,171,875	8,333,293,234,375	0.8413
		2023	9,297,210,347,525	7,846,409,863,035	0.8440
		2024	9,720,656,929,615	8,398,365,461,300	0.8640
19	TEBE	2021	989,060,914,000	663,913,777,000	0.6713
		2022	1,302,505,378,000	729,157,314,000	0.5598
		2023	1,150,900,654,000	675,509,740,000	0.5869
		2024	1,161,334,621,000	611,761,573,000	0.5268
20	TOBA	2021	12,258,843,514,824	380,982,348,066	0.0311
		2022	14,052,024,328,125	397,007,359,375	0.0283
		2023	14,582,483,445,280	547,350,837,275	0.0375
		2024	14,415,070,008,512	542,727,108,092	0.0376

Lampiran 4 Perhitungan Penghindaran Pajak

No	Kode	Tahun	Pajak Dibayarkan	Laba Sebelum Pajak	CETR
1	AKRA	2021	1,266,735,679	1,436,743,040	0.8817
		2022	1,785,055,986	3,085,916,786	0.5785
		2023	1,970,285,390	3,687,471,936	0.5343
		2024	2,247,687,582	2,838,907,151	0.7917
2	BBRM	2021	1,117,993,788	10,766,086,746	0.1038
		2022	1,740,875,000	12,582,984,375	0.1384
		2023	1,970,941,580	64,142,388,135	0.0307
		2024	2,419,591,935	135,235,648,883	0.0179
3	BESS	2021	5,544,857,213	124,343,362,042	0.0446
		2022	3,130,308,445	56,408,130,531	0.0555
		2023	6,085,262,805	81,094,051,677	0.0750
		2024	1,190,020,733	30,177,974,281	0.0394
4	BSML	2021	1,393,179,440	4,376,214,467	0.3184
		2022	734,208,530	16,596,488,363	0.0442
		2023	3,741,205,252	20,876,481,257	0.1792
		2024	3,019,665,236	11,270,680,110	0.2679
5	ENRG	2021	1,508,188,577,454	1,858,497,412,062	0.8115
		2022	1,024,453,890,625	2,661,861,203,125	0.3849
		2023	649,411,911,815	1,558,474,976,285	0.4167
		2024	515,703,533,107	1,530,694,019,251	0.3369
6	KKGI	2021	226,331,126,803	485,125,673,748	0.4665
		2022	273,715,250,000	907,169,015,625	0.3017
		2023	310,152,969,015	601,912,155,120	0.5153
		2024	197,454,621,219	972,523,554,949	0.2030
7	MBAP	2021	703,835,063,164	1,436,691,290,394	0.4899
		2022	907,071,437,500	3,603,986,343,750	0.2517
		2023	326,828,324,350	472,846,313,170	0.6912

		2024	77,176,135,970	401,246,987,827	0.1923
8	MCOL	2021	17,566,679,898	374,891,169,102	0.0469
		2022	857,567,406,250	1,849,494,734,375	0.4637
		2023	1961,670,640,540	4,546,427,273,225	0.4315
		2024	1,095,494,583,200	2,369,332,954,873	0.4624
9	MEDC	2021	2,740,066,000,224	3,848,351,836,926	0.7120
		2022	8,020,389,718,750	16,337,524,703,125	0.4909
		2023	7,590,786,626,460	11,198,025,051,320	0.6779
		2024	5,427,769,257,343	10,823,371,724,181	0.5015
10	MITI	2021	213,046,749	5,918,539,207	0.0360
		2022	4,879,173,694	19,578,876,245	0.2492
		2023	14,914,579,443	59,068,954,324	0.2525
		2024	13,325,422,037	19,508,113,527	0.6831
11	PSSI	2021	24,261,628,080	396,083,678,658	0.0613
		2022	49,639,640,625	731,691,484,375	0.0678
		2023	73,549,223,300	718,974,358,525	0.1023
		2024	80,225,597,613	277,492,767,594	0.2891
12	RAJA	2021	37,549,522,404	66,453,700,476	0.5650
		2022	42,336,390,625	203,498,125,000	0.2080
		2023	181,831,499,520	659,572,765,830	0.2757
		2024	200,268,260,753	879,597,160,157	0.2277
13	RMKE	2021	42,297,445,614	254,785,807,495	0.1660
		2022	87,815,533,445	515,291,871,806	0.1704
		2023	134,941,796,678	395,770,833,948	0.3410
		2024	109,217,242,112	351,981,057,151	0.3103
14	RUIS	2021	17,694,097,425	32,388,518,368	0.5463
		2022	24,230,899,909	38,796,496,871	0.6246
		2023	17,608,887,488	31,703,255,835	0.5554
		2024	15,112,455,815	27,802,001,500	0.5436
15	SGER	2021	34,567,100,197	270,778,171,010	0.1277

		2022	125,898,936,220	748,250,494,759	0.1683
		2023	147,639,717,584	840,910,489,431	0.1756
		2024	182,997,047,666	810,943,455,658	0.2257
16	SHIP	2021	117,258,187,974	348,364,052,856	0.3366
		2022	49,785,562,500	460,099,625,000	0.1082
		2023	86,405,898,555	472,278,052,810	0.1830
		2024	98,800,399,173	495,116,848,474	0.1995
17	SMMT	2021	6,413,309,295	258,001,970,758	0.0249
		2022	22,718,499,373	463,165,596,772	0.0491
		2023	75,811,152,452	280,054,340,392	0.2707
		2024	22,751,283,252	39,036,159,163	0.5828
18	SOCI	2021	10,534,696,404	110,392,107,798	0.0954
		2022	34,760,022,585	137,228,671,875	0.2533
		2023	497,627,825	167,713,485,040	0.0030
		2024	62,318,179,566	308,658,640,746	0.2019
19	TEBE	2021	20,805,281,000	208,350,578,000	0.0999
		2022	77,240,460,000	418,015,565,000	0.1848
		2023	136,827,650,000	297,964,736,000	0.4592
		2024	67,744,300,000	172,213,909,000	0.3934
20	TOBA	2021	320,571,332,205	1,235,342,320,638	0.2595
		2022	196,720,296,875	1,791,963,156,250	0.1098
		2023	397,396,550,050	505,422,066,005	0.7863
		2024	182,064,845,547	981,898,778,134	0.1854

Lampiran 5 Tabulasi Keseluruhan

No	Kode	Tahun	LEV	INS	CAP	CETR
1	AKRA	2021	1.0806	0.5960	0.2118	0.8817
		2022	1.0667	0.5960	0.1838	0.5785
		2023	1.1574	0.6017	0.1804	0.5343
		2024	1.2640	0.6361	0.1922	0.7917
2	BBRM	2021	2.1510	0.5256	0.7225	0.1038
		2022	0.3226	0.7822	0.6827	0.1384
		2023	0.1687	0.7822	0.7047	0.0307
		2024	0.1385	0.7822	0.6998	0.0179
3	BESS	2021	0.5478	0.7900	0.6712	0.0446
		2022	0.5693	0.8791	0.6902	0.0555
		2023	0.2060	0.8436	0.7211	0.0750
		2024	0.1115	0.8436	0.6883	0.0394
4	BSML	2021	1.6300	0.5400	0.0021	0.3184
		2022	1.0000	0.5202	0.0043	0.0442
		2023	1.0657	0.4641	0.0037	0.1792
		2024	0.9223	0.4547	0.0450	0.2679
5	ENRG	2021	1.3700	0.5134	0.8034	0.8115
		2022	1.3194	0.5359	0.7828	0.3849
		2023	1.3496	0.5744	0.8175	0.4167
		2024	1.4093	0.4555	0.7490	0.3369
6	KKGI	2021	0.3362	0.2719	0.1529	0.4665
		2022	0.3843	0.2734	0.1031	0.3017
		2023	0.4392	0.2863	0.1174	0.5153
		2024	0.2991	0.3704	0.1166	0.2030
7	MBAP	2021	0.2887	0.6000	0.0737	0.4899
		2022	0.2249	0.9000	0.0504	0.2517
		2023	0.3282	0.9000	0.0588	0.6912

		2024	0.2734	0.9000	0.1415	0.1923
8	MCOL	2021	0.4320	0.8910	0.2605	0.0469
		2022	0.3011	0.8910	0.2459	0.4637
		2023	0.2719	0.8910	0.2790	0.4315
		2024	0.3052	0.8910	0.2739	0.4624
9	MEDC	2021	3.6235	0.5165	0.0089	0.7120
		2022	2.9667	0.5423	0.0089	0.4909
		2023	2.6833	0.5184	0.0087	0.6779
		2024	2.3717	0.5176	0.0138	0.5015
10	MITI	2021	0.1303	0.7709	0.1694	0.0360
		2022	0.2057	0.7829	0.3065	0.2492
		2023	0.1356	0.7973	0.2892	0.2525
		2024	0.1360	0.7973	0.2795	0.6831
11	PSSI	2021	0.4063	0.4383	0.6234	0.0613
		2022	0.2295	0.4383	0.6186	0.0678
		2023	0.2091	0.4383	0.4882	0.1023
		2024	0.1979	0.4383	0.3998	0.2891
12	RAJA	2021	0.9628	0.3213	0.5086	0.5650
		2022	0.9579	0.4368	0.5504	0.2080
		2023	1.1266	0.5213	0.5201	0.2757
		2024	0.9280	0.4713	0.5067	0.2277
13	RMKE	2021	0.7446	0.7680	0.4565	0.1660
		2022	0.3896	0.7680	0.3765	0.1704
		2023	0.5138	0.7680	0.3508	0.3410
		2024	0.3714	0.7680	0.3579	0.3103
14	RUIS	2021	1.6618	0.2264	0.3376	0.5463
		2022	1.4202	0.2264	0.2730	0.6246
		2023	1.4418	0.2264	0.2048	0.5554
		2024	1.5234	0.2264	0.1470	0.5436
15	SGER	2021	1.8492	0.5442	0.0188	0.1277

		2022	2.3301	0.5519	0.0058	0.1683
		2023	2.0499	0.5008	0.0259	0.1756
		2024	1.0696	0.5008	0.0762	0.2257
16	SHIP	2021	1.1574	0.8162	0.7901	0.3366
		2022	1.2027	0.8162	0.8204	0.1082
		2023	0.5477	0.8162	0.8307	0.1830
		2024	1.1812	0.8162	0.7779	0.1995
17	SMMT	2021	0.2859	0.8365	0.0121	0.0249
		2022	0.1632	0.8365	0.0116	0.0491
		2023	0.2606	0.9811	0.0146	0.2707
		2024	0.5163	0.9611	0.0121	0.5828
18	SOCI	2021	0.7124	0.7990	0.8027	0.0954
		2022	0.6948	0.7990	0.8413	0.2533
		2023	0.5798	0.6670	0.8440	0.0030
		2024	0.5052	0.6670	0.8640	0.2019
19	TEBE	2021	0.2153	0.4663	0.6713	0.0999
		2022	0.2354	0.4663	0.5598	0.1848
		2023	0.0587	0.4663	0.5869	0.4592
		2024	0.0638	0.4663	0.5268	0.3934
20	TOBA	2021	1.4225	0.1579	0.0311	0.2595
		2022	1.1225	0.1555	0.0283	0.1098
		2023	1.2371	0.1445	0.0375	0.7863
		2024	1.0468	0.1407	0.0376	0.1854

Lampiran 6 Output SPSS

- Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
<i>LEVERAGE</i>	80	.06	3.62	.8634	.73598
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	80	.14	.98	.5985	.22596
CAPITAL INTENSITY	80	.00	.86	.3558	.29721
PENGHINDARAN PAJAK	80	.00	.88	.3089	.22478
Valid N (listwise)	80				

- Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov TestUnstandardized
Residual

N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.20414274
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.080
	Negative	-.047
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2- tailed) ^e	Sig.	.225
	99% Confidenc e Interval	Lower Bound
		Upper Bound
		.215
		.236

- Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	<i>LEVERAGE</i>	.825	1.212
	KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	.840	1.190
	<i>CAPITAL INTENSITY</i>	.913	1.095

a. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK

- Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.419 ^a	.175	.143	.20813	1.579

- Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.365	.090		4.071	<.001
<i>LEVERAGE</i>	.075	.035	.245	2.134	.036
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	-.105	.113	-.106	-.929	.356
<i>CAPITAL INTENSITY</i>	-.164	.082	-.216	-1.984	.051

- Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.419 ^a	.175	.143	.20813

- Hasil Uji Simultan (F-Test)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.699	3	.233	5.381	.002 ^b
	Residual	3.292	76	.043		
	Total	3.992	79			

- Hasil Uji Parsial (T-Test)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.365	.090		4.071	<.001
	LEVERAGE	.075	.035	.245	2.134	.036
	KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	-.105	.113	-.106	-.929	.356